BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament

"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI

KEGIATAN

MS IV Tahun Sidang 2021-2022
(29 Maret – 14 April 2022)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.

21/9/21

DAFTAR ISI

KOMISI II 1

A. FUNGSI LEGISLASI 1
B. FUNGSI ANGGARAN 1
C. FUNGSI PENGAWASAN 14

KOMISI III 19

A. FUNGSI LEGISLASI 19
B. FUNGSI ANGGARAN 21
C. FUNGSI PENGAWASAN 21

KOMISI IV 34

A. FUNGSI LEGISLASI 34
B. FUNGSI ANGGARAN 34
C. FUNGSI PENGAWASAN 34

KOMISI V 39

A. FUNGSI LEGISLASI 39
B. FUNGSI ANGGARAN 39
C. FUNGSI PENGAWASAN 39

KOMISI VI 52

A. FUNGSI LEGISLASI 52
B. FUNGSI ANGGARAN 52
C. FUNGSI PENGAWASAN 52

KOMISI VII 66

A. FUNGSI LEGISLASI 66
B. FUNGSI ANGGARAN 66
C. FUNGSI PENGAWASAN 66

KOMISI VIII 71

A. FUNGSI LEGISLASI 71
B. FUNGSI ANGGARAN 71
C. FUNGSI PENGAWASAN 80

KOMISI IX 81

A. FUNGSI LEGISLASI 81
B. FUNGSI ANGGARAN 81
C. FUNGSI PENGAWASAN 82

KOMISI X 87

A. FUNGSI LEGISLASI 87
B. FUNGSI ANGGARAN 87
C. FUNGSI PENGAWASAN 88

KOMISI XI 93

A. FUNGSI LEGISLASI 93
B. FUNGSI ANGGARAN 93
C. FUNGSI PENGAWASAN 93

BADAN LEGISLASI 100

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN 103

MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN 122

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA 123

BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 125

PANITIA KHUSUS 127

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, BPIP, dan KSP	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan Raker/RDP Komisi II DPR RI, terkait evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2021	1. Komisi II DPR RI dapat menerima hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 yang disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp2.243.155.114.960,- (*dua triliun dua ratus empat puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta seratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*)** dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp2.314.874.225.000,- (*dua triliun tiga ratus empat belas***

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sekitar **96.90%.** 2. Komisi II DPR RI dapat menerima hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 yang disampaikan oleh Kantor Staf Presiden (KSP), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp97.479.192.208,- (*sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah*)** dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp100.478.915.000,- (*seratus miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*)** atau sekitar **97.01%.** 3. Komisi II DPR RI dapat menerima hasil pelaksanaan

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				program dan anggaran tahun 2021 yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet (Setkab), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp286.644.904.219,- (*dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah*)** dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp297.668.676.000,- (*dua ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)** atau sekitar **96.31%**. 4. Komisi II DPR RI dapat menerima hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 yang disampaikan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan tingkat

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp155.764.377.031,- (*seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puuh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah*)** dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp159.797.209.000,- (*seratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu rupiah*)** atau sekitar **97.48%**.
2.	Kementerian Dalam Negeri, BNPP, dan DKPP	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan Raker/RDP Komisi II DPR RI, terkait evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2021	1. Komisi II DPR RI dapat menerima hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp2.909.033.451.195,-** (***dua triliun sembilan ratus sembilan miliar tiga puluh***

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp2.934.557.569.000,- (*dua triliun sembilan ratus tiga puluh empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*)** atau sekitar **99.13%.** 2. Komisi II DPR RI dapat menerima hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 yang disampaikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp150.812.094.994,-** (***seratus lima puluh miliar delapan ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah***) dari pagu alokasi

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				anggaran sebesar **Rp151.559.459.000,- (*seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*)** atau sekitar **99.51%.** 3. Komisi II DPR RI dapat menerima hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 yang disampaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp26.417.358.052,- (*dua puluh enam miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah*)** dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp26.682.541.000,- (*dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta***

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) atau sekitar **99.01%.** 4. Komisi II DPR RI meminta kepada Kemendagri, BNPP, dan DKPP untuk menyampaikan jawaban dan tanggapan secara tertulis atas seluruh pertanyaan dari Anggota Komisi II DPR RI pada Rapat Kerja hari ini, dan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 11 April 2022 melalui Sekretariat Komisi II DPR RI.
3.	Kementerian ATR/BPN	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan Raker/RDP Komisi II DPR RI, terkait evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2021	Komisi II DPR RI dapat menerima hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 yang disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp7.729.949.577.727,-** (***tujuh***

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp8.517.134.455.000,- (*delapan triliun lima ratus tujuh belas miliar seratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*)** atau sekitar **90.76%.**
4.	Kementerian PAN&RB, BKN, LAN, KASN, ANRI, dan ORI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan Raker/RDP Komisi II DPR RI, terkait evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2021	1. Komisi II DPR RI dapat menerima hasilNo pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan&RB), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp199.978.358.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan***

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp202.861.466.000,- (*dua ratus dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah***) atau sekitar **98.58%.** 2. Komisi II DPR RI dapat menerima hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 yang disampaikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp43.252.363.000,-** (***empat puluh tiga miliar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah***) dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp44.604.902.000,- (*empat***

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				puluh empat miliar enam ratus empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah) atau sekitar **96.97%.** 3. Komisi II DPR RI dapat menerima hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp704.320.385.395,-** (***tujuh ratus empat miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah***) dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp752.415.051.000,- (*tujuh ratus lima puluh dua miliar empat ratus lima belas juta lima puluh satu ribu rupiah*)** atau sekitar **93.61%.**

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				4. Komisi II DPR RI dapat menerima hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 yang disampaikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp301.787.243.026,-** (***tiga ratus satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah***) dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp308.446.909.000,- (*tiga ratus delapan miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah*)** atau sekitar **97.84%.** 5. Komisi II DPR RI dapat menerima hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 yang disampaikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dengan

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp234.726.067.648,-** (***dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah***) dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp245.618.004.000,- (*dua ratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan belas juta empat ribu rupiah***) atau sekitar **95.57%.** 6. Komisi II DPR RI dapat menerima hasil pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021 yang disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dengan tingkat penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar **Rp190.773.339.668,-** (***seratus sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta***

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) dari pagu alokasi anggaran sebesar **Rp198.162.445.000,- (*seratus sembilan puluh delapan miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*)** atau sekitar **96.27%.** 7. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PAN&RB, KASN, BKN, LAN, ANRI, dan ORI untuk menyampaikan jawaban dan tanggapan secara tertulis atas seluruh pertanyaan dari Anggota Komisi II DPR RI pada Rapat Kerja hari ini, dan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 11 April 2022 melalui Sekretariat Komisi II DPR RI.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian ATR/BPN	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan RDPU Komisi II DPR RI dengan Perwakilan BPD Masyarakat Desa Bojongkoneng, Direksi PT Sentuk City Tbk, Laode Moh Manaf&Rekan, Ketua Umum Lembaga Pembaharuan Reformasi Pertanahan Nasional, Aliansi Masyarakat Massenrempu, Yoseph Umar Hadi (Perwakilan Warga RT 01 – RT 16, RW.09) Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, dan Ketua Umum Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), terkait audiensi terkait sengketa pertanahan	Komisi II DPR RI menerima audiensi tersebut dan akan membahas pada rapat pleno Komisi II, serta diteruskan ke Mitra kerja terkait.
2.	Audiensi	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan RDPU/Audiensi Komisi II DPR RI dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Walikota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dan Tim Kerja Percepatan Pemekaran Kota Raha, terkait persoalan keberadaan status hukum	1. Terkait usulan percepatan pemekaran Kota Raha yang telah mengantongi Ampres sejak tahun 2012, Komisi II DPR RI bersepakat untuk melakukan pendalaman dan kajian untuk melihat apakah hal tersebut bisa dilakukan

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Pulau Kawikawia masih menjadi polemik antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Kab Buton Selatan) dengan Provinsi Sulawesi Selatan (Kab Kepualauan Selayar), konsultasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, dan konsultasi terkait Pemekaran Daerah	lebih cepat. Komisi II DPR RI perlu mengetahui secara lebih detail mengapa pemekaran Kota Raha untuk menjadi Daerah Otonomi Baru selalu tertunda. 2. Terkait status pulau Kawikawia yang saat ini terus diperebutkan antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi II DPR RI bersepakat untuk membentuk Panja khusus untuk mendalami dan menyelesaikan status pulau tersebut. Bersama ini pula, Komisi II menganggap penting untuk menggelar rapat sesegera mungkin dengan Kemendagri untuk mendudukkan masalah pulau Kawikawia. 3. Terkait perpindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				dari Banjarmasin ke Banjarbaru sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi II DPR RI tetap berkomitmen dan terus mendorong agar UU yang baru tersebut dapat menjadi pijakan Pemprov dalam mendorong percepatan pembangunan secara lebih menyeluruh di Kalsel.
3.	Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan Raker/RDP Komisi II DPR RI terkait persiapan Pemilu Tahun 2024.	1. Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI menegaskan kembali bahwa hari pemungutan suara Pemilihan Umum Serentak (untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				Anggota DPD RI) adalah Rabu, 14 Februari 2024, dan hari pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak tahun 2024 adalah Rabu, 27 November 2024. 2. Komisi II DPR RI menekankan agar KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI dapat menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, independen, mandiri, dan profesional untuk suksesnya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. 3. Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI bersepakat untuk segera melaksanakan pembahasan dan pendalaman lebih lanjut

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				terkait dengan tahapan, program, jadwal, anggaran dan hal-hal terkait lainnya mengenai desain dan konsep Pemilu 2024 sebelum masuknya tahapan awal Pemilu Serentak Tahun 2024.
4.	Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Pemerintah Daerah Kota Cirebon, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Melakukan kunjungan kerja pada reses masa persidangan IV ke Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kabupaten Garut (Provinsi Jawa Barat)	1. Membahas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik di masa pandemik Covid-19. 2. Membahas penanganan permasalahan kasus pertanahan di Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kabupaten Garut (Provinsi Jawa Barat).

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	**RUU tentang Hukum Acara Perdata**	---	Berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi III DPR RI tanggal 16 Maret 2022 untuk kegiatan Pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata akan diawali dengan mendengarkan masukan dari para narasumber setelah itu akan dilaksanakan kunjungan kerja luar negeri yang akan dilaksanakan sekitar bulan Juni atau Juli 2022. Sebelum melaksanakan rapat Panja RUU tentang Hukum Acara Perdata, guna menambah khasanah dan wawasan terkait dengan pelaksanaan Hukum Acara Perdata, Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai narasumber, antara lain: ➢ RDPU tanggal 7 April 2022, dipimpin oleh Ketua Panja RUU tentang Hukum Acara Perdata, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., dengan : a. Ketua Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) b. Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI).	---

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	**RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**	Rapat Kerja Dan Rapat Dengar Pendapat Umum	Surpres Nomor R-02/Pres/01/2022 menugaskan Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi & Birokrasi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*selanjutnya disebut RUU ttg Narkotika).* Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 3 Februari 2022 dan tertuang dalam surat Pimpinan DPR RI Nomor T/209/PW.11.01/02/2022 menugaskan KOMISI III DPR RI bersama-sama Pemerintah untuk membahas RUU ttg Narkotika. Rapat Kerja Pembahasan RUU ttg Narkotika dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2022, dengan salah satu agenda adalah penyerahan DIM dan Pembentukan Panja. Sebelum masuk pembahasan pada Tingkat Panja, Komisi III DPR RI akan mengundang beberapa narasumber guna mendengarkan masukan terkait dengan substansi RUU tentang Narkotika, yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2022 dipimpin oleh Ketua Panja, Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M., RDPU dengan: 1. ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*)	**Kesimpulan Raker tanggal 31 Maret 2022:** 1. Menerima Penjelasan Pemerintah dan Pandangan dari masing-masing Fraksi terhadap RUU tentang Narkotika. 2. Menyetujui RUU tentang Narkotika untuk dibahas pada Tingkat Panja. 3. Menyetujui pembentukan Panja RUU tentang Narotika. 4. Menyetujui Ketua Panja RUU tentang Narkotika adalah Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			2. PRESNAS FOKAN (Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkotika). 3. Bakornas GMDM (Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati). Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 yang akan datang, Panja RUU tentang Narkotika akan melaksanakan kegiatan kunjungan kerja legislasi dan pembahasan DIM.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Kepala Korps Lalu Lintas 2. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan MABES POLRI	Rapat Dengar Pendapat	Membahas: 1. Capaian target PNBP di tahun 2021 & target pencapaian PNBP di tahun 2022 serta renstra Program Prioritas 2022 2. Pelaksanaan tupoksi dalam rangka optimalisasi Penyelamatan Keuangan	1. RDP dilaksanakan secara fisik & virtual. 2. Pelaksanaan tanggal 28 Maret 2022.. 3. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. 4. **Kesimpulan**:

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Negara serta meningkatkan terget PNBP.	1) Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Kabaintelkam dan Kakorlantas Polri mengenai capaian target PNBP tahun 2021 serta pemanfaatannya dan target pencapaian PNBP tahun 2022 serta program-program prioritas dan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya. 2) Komisi III DPR RI meminta Kabaintelkam dan Kakorlantas Polri agar menyampaikan data mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama 2 tahun terakhir dan kemudian disampaikan kepada Komisi III DPR RI. 3) Komisi III DPR RI meminta Kabaintelkam dan Kakorlantas Polri untuk meningkatkan capaian

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023 dalam rangka menambah keuangan negara sesuai dengan tupoksi masing-masing.
2.	Kepala Badan Narkotika Nasional RI (BNN RI)	Rapat Kerja	Membahas: 1. Capaian target PNBP di tahun 2021 & target pencapaian PNBP di tahun 2022 serta renstra Program Prioritas 2022. 2. Pelaksanaan tupoksi dalam rangka optimalisasi Penyelamatan Keuangan Negara serta meningkatkan terget PNBP. 3. Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	1. Raker dilaksanakan secara fisik & virtual. 2. Pelaksanaan tanggal 29 Maret 2022. 3. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. 4. **Kesimpulan**: 1) Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan BNN RI mengenai capaian PNBP tahun 2021 dan target pencapaian PNBP tahun 2022 serta program-program prioritas dan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya. 2) Komisi III DPR RI meminta BNN RI agar

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				menyampaikan data mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama 3 (tiga) tahun terakhir dan kemudian disampaikan kepada Komisi III DPR RI. 3) Komisi III DPR RI mendukung penguatan dan eksistensi BNN RI dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam upaya optimalisasi dan peningkatan tugas dan fungsi BNN dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika serta rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkotika.
3.	Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Rapat Kerja	Membahas: 1. Capaian target PNBP di tahun 2021 & target pencapaian PNBP di tahun 2022 serta renstra Program Prioritas 2022.	1. Raker dilaksanakan secara fisik & virtual. 2. Pelaksanaan tanggal 30 Maret 2022.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			2. Pelaksanaan tupoksi dalam rangka optimalisasi Penyelamatan Keuangan Negara serta meningkatkan terget PNBP.	3. Raker dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Bambang Wuryanto, MBA. 4. **Kesimpulan**: 1) Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan KPK terkait capaian PNBP tahun 2021 dan target PNBP di tahun 2022, serta selanjutnya meminta data terkait PNBP KPK selama 5 (lima) tahun terakhir. 2) Terhadap penjelasan program unggulan dan rencana prioritas kerja KPK di tahun 2022, Komisi III DPR RI meminta KPK untuk dapat berfokus pada upaya penyelamatan keuangan negara, baik melalui penegakan hukum maupun pembangunan sistem pencegahan korupsi di berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/D, dan sektor lainnya.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				3) Komisi III DPR RI meminta KPK untuk dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk dapat meningkatkan capaian penyelamatan keuangan negara melalui penegakan hukum korupsi yang bersih, adil, berintegritas, dan profesional.
4.	1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum 2. Direktur Jenderal Imigrasi 3. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM RI	Rapat Dengar Pendapat	Membahas: 1. Capaian target PNBP di tahun 2021 & target pencapaian PNBP di tahun 2022 serta renstra Program Prioritas 2022. 2. Pelaksanaan tupoksi dalam rangka optimalisasi Penyelamatan Keuangan Negara serta meningkatkan terget PNBP	1. RDP dilaksanakan secara fisik & virtual. 2. Pelaksanaan tanggal 31 Maret 2022. 3. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. 4. **Kesimpulan**: 1) KOMISI III DPR RI dapat menerima penjelasan Dirjen Imigrasi, Dirjen KI, dan Dirjen AHU terkait Capaian PNBP tahun 2021 dan target PNBP di tahun 2022 dan 2023, serta selanjutnya meminta data terkait target

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				dan capaian PNBP selama 5 (lima) tahun terakhir. 2) KOMISI III DPR RI akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Prioritas Kerja Ditjen Imigrasi, Ditjen KI, dan Ditjen AHU pada tahun 2022, khususnya dalam mendukung upaya peningkatan perekonomian nasional dan penerimaan negara. 3) KOMISI III DPR RI meminta Dirjen Imigrasi, Dirjen KI, dan Dirjen AHU untuk terus mengembangkan modernisasi dan inovasi sistem layanan publik yang Cepat, Mudah, Profesional, dan Transparan, serta mampu berkontribusi pada pendapatan negara.
5.	1. Kepala Kepolisian Daerah 2. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan	Kunjungan Kerja Spesifik	Pengawasan penegakan hukum. terhadap Sumber Daya Alam dan Penyelamatan Keuangan Negara.	1. Dilaksanakan pada hari Jumat sd Minggu, tanggal 1 sd 3 April 2022. 2. Kunspek dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. 3. Anggota Tim berdasarkan proporsional komposisi fraksi.
6.	1. Sekretaris Jenderal MPR RI 2. Sekretaris Jenderal DPD RI	Rapat Dengar Pendapat	Membahas: 1. Realisasi dan evaluasi anggaran Tahun 2021. 2. Pelaksanaan program prioritas Tahun 2022 3. Rencana Kerja Tahun 2023	1. RDP dilaksanakan secara fisik & virtual. 2. Pelaksanaan tanggal 4 April 2022. 3. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. 4. **Kesimpulan**: 1) Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Sekretaris Jenderal MPR RI dan Sekretaris Jenderal DPD RI mengenai realisasi dan evaluasi anggaran tahun 2021, program kerja tahun 2022 serta program-program prioritas dan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. 2) Komisi III DPR RI meminta Sekretaris Jenderal MPR

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				RI agar menyampaikan hasil Pengkajian Kemajelisan dan Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. 3) Komisi III DPR RI meminta Sekretaris Jenderal DPD RI agar menyampaikan materi/produk legislasi berupa RUU Usul Inisiatif DPD RI, Pandangan/Pendapat atas RUU, Hasil Pertimbangan dan Pengawasan DPD RI atas UU Tertentu, dan Prolegnas usul DPD RI.
7.	Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Negara (PPATK)	Rapat Kerja	Membahas: 1. Capaian target PNBP di tahun 2021 & target pencapaian PNBP di tahun 2022 serta renstra Program Prioritas 2022. 2. Pelaksanaan tupoksi dalam rangka optimalisasi Penyelamatan Keuangan Negara serta meningkatkan terget PNBP.	1. Raker dilaksanakan secara fisik & virtual. 2. Pelaksanaan tanggal 5 April 2022. 3. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. 4. **Kesimpulan**: 1) Komisi III DPR RI menerima penjelasan Kepala PPATK terkait

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				realisasi PNBP tahun 2021, target PNBP Umum tahun 2022, rencana penerimaan PNBP Fungsional tahun 2022, rencana kerja PPATK Tahun Anggaran 2022, dan *Output* Prioritas Nasional tahun 2022, serta akan melakukan pengawasan terhadap pencapaiannya. 2) Komisi III DPR RI mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Prioritas Kerja PPATK pada tahun 2022, khususnya dalam mendukung upaya optimalisasi penerimaan negara dan penyelamatan keuangan negara. 3) Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk meningkatkan pemantauan dan kemampuan deteksi dini terhadap transaksi-transaksi mencurigakan

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme termasuk kejahatan terhadap lingkungan hidup serta kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengganggu keuangan negara dan perekonomian nasional. 4) Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk memberikan kajian dan penjelasan lebih detail terkait usulan PPATK mengenai RUU tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana dan RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
8.	1. Sekretaris Mahkamah Agung RI 2. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 3. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial	Rapat Dengar Pendapat	Membahas: 1. Realisasi dan evaluasi anggaran Tahun 2021. 2. Pelaksanaan program prioritas Tahun 2022. 3. Capaian target PNBP di tahun 2021 & target pencapaian PNBP di tahun 2022.	1. RDP dilaksanakan secara fisik & virtual. 2. Pelaksanaan tanggal 6 April 2022. 3. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.. 4. **Kesimpulan**:

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			4. Rencana Kerja Tahun 2023..	Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI mengenai realisasi dan evaluasi anggaran tahun 2021, program prioritas tahun 2022 dan rencana kerja tahun 2023 serta akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya.
9.	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten	Kunjungan Kerja Spesifik	dalam rangka persiapan pengamanan mudik dan pengamanan Kebutuhan Bahan Pokok (sembako) dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri 2022.	1. Dilaksanakan pada hari Minggu sd Senin, tanggal 10 sd 11 April 2022. 2. Kunspek dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.. 3. Anggota Tim berdasarkan proporsional komposisi fraksi.
10.	Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Provinsi Dki Jakarta	Kunjungan Kerja Spesifik	dalam rangka persiapan pengamanan mudik dan pengamanan Kebutuhan	1. Dilaksanakan pada hari Selasa sd Rabu, tanggal 12 sd 13 April 2022.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Bahan Pokok (sembako) dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri 2022.	2. Kunspek dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom.. 3. Anggota Tim berdasarkan proporsional komposisi fraksi.
11.	1. Kepala Kepolisian Daerah 2. Kepala Kejaksaan Tinggi 3. Kepala BNN Provinsi 4. Kepala Kanwil Kemenkumham 5. Ketua Pengadilan Tinggi 6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama 7. Ketua Pengadilan TUN 8. Ketua Pengadilan Militer	Kunjungan Kerja Reses MP IV TS 2021-2022	Komisi III DPR RI akan melaksanakan Kunker Reses ke 3 (tiga) daerah, yaitu: 1. Provinsi Riau, tanggal 15 sd 19 April 2022, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. 2. Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 sd 21 April 2022, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum 3. Provinsi Gorontalo, tanggal 17 sd 21 April 2022, dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A.	---

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	Rapat Harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI.	Penyusunan RUU dengan Mekanisme Penggantian, bukan Perubahan.	Akan dilaksanakan Rapat Harmonisasi lanjutan untuk membahas Revisi Konsep RUU, untuk kemudian diajukan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR RI.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) b. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI),	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	RDPU Membahas Permasalahan Pangan Nasional, terutama Minyak Nabati.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Kementerian Pertanian (11 Eselon 1) serta Direksi Perum Bulog dan ID FOOD	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	Membahas tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 22 Maret 2022, dan Lain-lain.	
3.	Kementerian Pertanian	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; d. Kebijakan Pemerintah	a. Restrukturisasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2022; b. Rencana Kerja Kementerian Pertanian TA 2023; dan c. Isu-isu Aktual Lainnya.	
4.	a. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementetian Pertanian b. Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	d. RDP Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat dalam rangka mendapat masukan sebagai salah satu Bahan untuk Merumuskan Rekomendasi	
5.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI; b. Program Prioritas Tahun 2023; dan c. Isu-isu Aktual Lainnya.	
6.	a. Akar Bumi Indonesia, b. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau c. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	RDPU Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan membahas Permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (13 Eselon 1) serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	Tindak lanjut Raker Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove membahas Program Prioritas Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual Lainnya.	
8.	Rapat Intern Panja Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Perumusan Rencana Kerja Panja Panja Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan Tahun 2022.	
9.	Serikat Karyawan Perum Perhutani	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	Mendengarkan Aspirasi Serikat Karyawan Perum Perhutani mengenai Kepastian Kerja Pasca DItetapkannya Kawasan Hutan dengan Pengelolaan (KHDPK) di Wilayah Kerja Perum Perhutani.	
10.	Kementerian Kelautan dan Perikanan (9 Eselon 1) serta Direktur Utama PT. Perikanan Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. Garam (Persero)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	Tindak lanjut Raker Menteri Kelautan dan Perikanan membahas Program Prioritas Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual Lainnya.	
11.	Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur - Meninjau dan berdiskusi mengenai kondisi ketersediaan dan harga pangan menjelang	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional. - Meninjau dan melakukan pertemuan dengan pedagang komoditas pangan di Pasar Wonokromo - Melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog, ID FOOD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Disperindag Provinsi Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur (Satgas Pangan Provinsi Jawa Timur).	
12.	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja Spesifik ke kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah - Mendengarkan penjelasan, berdialog dan mendapatkan masukan langsung dari para *stakeholder* tentang ketersediaan pangan menjelang Idul Fitri 2022. - Mendapatkan informasi, masukan dan alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan oleh Komisi IV DPR RI bersama dengan Menteri dan jajaran mitra kerja Komisi IV untuk perbaikan distribusi pangan kedepan.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
13.	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan - Melihat secara langsung kondisi ketersediaan pangan di gudang menjelang ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443H; - Mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai permasalahan kelangkaan minyak goreng dan komoditas pangan lainnya di tingkat pengecer atau pasar tradisional; - Menyerap aspirasi masyarakat dan *stakeholder* terkait dengan permasalahan yang timbul, serta menindaklanjuti berbagai temuan untuk disampaikan ke mitra kerja komisi IV DPR RI saat Raker dan RDP.	
14.	Inspesi Mendadak (Sidak)	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Sidak terkait Pengaduan Pencamar Air, ke Lokasi Pengolahan Air Limbah Produksi Ikan serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kawasan Industri Pengolahan Ikan Muara Baru, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	**Revisi UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ**	RDPU dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi On line	Masukan Direksi Penyedia Layanan Transportasi On line (Gojek, Grab, Maxim; Blue Bird) dalam penyusunan NA dan Draft Revisi RUU LLAJ	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	**RDP DGN DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT menghadirkan Direksi PT. Pelindo, PT. Pelni,**	1. Membahas mengenai pengelolaan Pelabuhan dan pelayaran di Indonesia; 2. Lain-lain.	1. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut, PT. Pelindo dan PT. Pelni untuk melakukan kajian dan evaluasi terkait program Tol Laut serta melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI. 2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			menginventarisir permasalahan pembangunan pelabuhan di Indonesia baik yang dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan maupun yang diselenggarakan oleh PT. Pelindo dan melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI. 3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut dan PT. Pelindo untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan terkait pembangunan dan pemanfaatan Pelabuhan di seluruh Indonesia. 4. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan upaya dalam peningkatan peluang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di pelabuhan seluruh Indonesia dan memberi ruang yang memadai bagi keikutsertaan masyarakat untuk berusaha di pelabuhan. 5. Komisi V DPR RI meminta PT. Pelindo dan PT. Pelni untuk meningkatkan koordinasi terkait pelayanan kepelabuhanan dan armada pelayaran dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	**RDP DGN DIRJEN BINA KONSTRUKSI dan LPJK dengan menghadirkan LKPP dan KPPU**	1. Membahas mengenai permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa bidang Konstruksi; 2. Lain-lain	1. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Konstruksi dan LPJK untuk meningkatkan koordinasi dengan LKPP terkait dengan evaluasi dan perumusan ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi terhadap penyelesaian permasalahan pelaksanaan pelelangan. 2. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Bina Konstruksi untuk memperketat pengawasan terhadap setiap proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa dibidang konstruksi, termasuk pada *track record* peserta lelang maupun kesiapan material dan peralatan. 3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Konstruksi untuk memberikan ruang kesempatan berusaha yang lebih luas kepada penyedia jasa konstruksi lokal.	
3.	**KUNFIK PENGAWASAN BIDANG PUPR**	- Meninjau pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Kawasan Industri Terpadu; Batang Jawa Tengah;	- Komisi V DPR RI meninjau secara langsung progres pembangunan infrastruktur pendukung Kawasan Industri Terpadu Batang yang merupakan salah satu proyek strategis Nasional. Kementerian PUPR melakukan pembangunan 10 *Tower*	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		- Pembangunan Jalan Akses Tol Makassar New Port Tahap I dan II; - Jawa Timur (tindaklanjut pemanfaatan Long Storage dan terkait pembangunan Bandara Kediri)	Rumah Susun untuk Pekerja, Resevoir, dan akses Jalan menuju Kawasan Industri Terpadu Batang. Komisi V DPR RI meminta agar pembangunan dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat. - Komisi V DPR RI meninjau secara langsung proyek pembangunan Jalan Akses Tol Makassar *New Port* yang merupakan salah satu proyek strategis nasional yang sangat bermanfaat untuk pengiriman Logistik dan mempercepat pendistribusian ke daerah-daerah. Selain itu diharapkan akan meningkatkan konektivitas Pelabuhan dengan Jalan Tol existing sehingga waktu tempuh transportasi Peti Kemas akan lebih cepat dari sebelumnya. - Komisi V DPR RI melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dihadiri Mitra Kerja Komisi V DPR RI dari Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Perhubungan Udara untuk membahas permasalahan terkait pemanfaat *Long Storage* Kalimati yang telah selesai pembangunannya sejak tahun 2019 namun belum dapat	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dimanfaatkan secara optimal oleh Masyarakat sekitar khususnya Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto. Selain itu Komisi V DPR RI juga membahas permasalahan banjir pada proyek pembangunan Bandara Dhoho Kediri, Jawa Timur.	
4.	**RAKER DENGAN MENTERI PERHUBUNGAN**	- Membahas Hapsem I 2021 Membahas isu-isu terkait PNBP bidang Perhubungan; - Lain-lain	1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan atas capaian opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) pada Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2021. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk mempertahankan predikat WTP tersebut di masa mendatang. 2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan-temuan dalam Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2021 tidak terulang kembali, sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI. 3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk mengkaji secara mendalam potensi-potensi baru	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			sumber peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Perhubungan. 4. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk memprioritaskan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada barang dan jasa sektor Perhubungan.	
5.	**RDP DGN DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA menghadirkan Direksi PT AP I, AP II, dan LPPNPI**	1. Membahas mengenai pengelolaan, pelayanan dan keselamatan penerbangan; 2. Lain-lain.	1. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II untuk meningkatkan fasilitas pelayanan, mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan Bandar Udara serta pengawasan pemeliharaan pesawat dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan dan kualitas pelayanan. 2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II untuk memaksimalkan pengawasan terhadap pelayanan barang penumpang dan fluktuasi harga tiket dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara dan LPPNPI (*Airnav* Indonesia) untuk menyusun rencana strategis (*blueprint*) terkait telah kembalinya *Flight Information Region* (FIR) di atas Kepulauan Natuna kepada Pemerintah Indonesia. 4. Terkait dengan dukungan pelayanan navigasi penerbangan pada kegiatan G-20, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara dan LPPNPI (*Airnav* Indonesia) agar meningkatkan koordinasi lintas instansi dalam rangka pengaturan pergerakan lalu lintas (*traffic movement)* untuk mempersiapkan prosedur darurat (*contingency procedure*) terkait erupsi vulkanis (*volcanic eruption)* dan jadwal kedatangan serta keberangkatan tamu kenegaraan. 5. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan c.q. Ditjen Perhubungan Udara agar pelaksanaan konsorsium pengelolaan Bandar Udara harus lebih menguntungkan dan memperhatikan kepentingan nasional jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	**RAKER/RDP DGN MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI PUPR, KA BMKG, KA BASARNAS, DAN KAKORLANTAS POLRI**	Membahas mengenai kesiapan infrastruktur dan transportasi Mudik Lebaran tahun 2022	1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan bersama Kementerian PUPR, BMKG, BNPP (Basarnas) dan Korlantas Polri untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran Tahun 2022. 2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran tahun 2022 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. memastikan kelaikoperasian sarana angkutan di semua moda dan keberlanjutan (*sustainabilitas*) pelayanan angkutan selama masa angkutan Lebaran 2022; b. meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap protokol kesehatan di simpul-simpul transportasi seperti pelabuhan, bandara, terminal dan stasiun; c. meningkatkan koordinasi dengan operator transportasi terkait penyelenggaraan angkutan Lebaran; dan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			d. mengoptimalkan pengawasan terhadap fluktuasi harga tiket. 3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan mudik Lebaran tahun 2022 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. meningkatkan upaya preservasi jalan di ruas-ruas utama; b. meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana Tempat Istirahat dan Pelayanan (*rest area*) pada jalur-jalur mobilitas lebaran; dan c. mensiagakan peralatan untuk mengantisipasi penanganan potensi bencana. 4. Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) agar meningkatkan sosialisasi informasi cuaca dan peringatan dini kepada masyarakat, serta memaksimalkan *quick response time* dalam upaya pertolongan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	**KUNFIK PENGAWASAN UNTUK MENINJAU KESIAPAN INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI PADA MUDIK LEBARAN 2022**	Kunker ke - Solo, Jawa Tengah; - Lampung-Banten; dan - Padang, Sumbar	Komisi V DPR RI melakukan pertemuan dengan Mitra Kerja Komisi V DPR RI dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BMKG. dan Basarnas untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan transportasi pada Mudik Lebaran tahun 2022, dilanjutkan dengan melakukan peninjauan lapangan ke Bandara, Stasiun KA, Pelabuhan Penyeberangan, Jalan Nasional dan jalan Tol untuk menunjang kelancaran perjalanan para pemudik nantinya.	
8.	**RAKER DENGAN MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI**	- Membahas Hapsem I 2021 - Membahas isu-isu terkait desa tertinggal rekruitmen Tenaga Pendamping Desa; - Membahas Eks PNPM	1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi atas capaian opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) pada Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2021. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk mempertahankan predikat WTP tersebut di masa mendatang.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan-temuan dalam Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2021 tidak terulang kembali, sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI. 3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja tenaga pendamping desa dan melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI.	
9.	**RAKER DENGAN MENTERI PUPR**	- Membahas Hapsem I 2021 - Membahas isu-isu bidang PUPR, rekonstruksi Pasca bencana, pengentasan Kemiskinan Ekstrim;	1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas capaian opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) pada Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2021. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk mempertahankan predikat WTP tersebut di masa mendatang. 2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah preventif agar	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			temuan-temuan dalam Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2021 tidak terulang kembali, sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI. 3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di beberapa daerah serta meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam upaya pencegahan bencana (antara lain pembangunan infrastruktur tangguh bencana), mengoptimalkan mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan untuk meminimalisir dampak bencana. 4. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar melakukan penajaman dan penetapan lokus pada program penanganan kemiskinan ekstrim dengan memperhatikan saran dan masukan Komisi V DPR RI.	
10.	**RDP DGN DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT**	- Membahas mengenai PNBP sektor Hubdat - Membahas mengenai Revisi RUU LLAJ;	1. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap semua Jenis Jasa Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		- Membahas permasalahan ODOL; - Lain-lain	meningkatkan pendapatan negara dari sektor Perhubungan Darat. 2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengelolaan PNBP sektor Perhubungan Darat dan melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI. 3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam upaya pencegahan kendaraan *Over Dimension* dan *Over Load* (ODOL). 4. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk menuntaskan digitalisasi dalam pelayanan agar tercapai sistem perijinan yang lebih cepat, efektif, dan transparan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI menyampaikan dukungannya kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menghadapi dan mengatasi tantangan sistem kelistrikan Tahun 2022 terkait Oversupply pada sistem Jawa-Bali dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, serta meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk memperhatikan calon investor dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) PLN dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada sistem kelistrikan Jawa, Sumatera, Kalimantan interkoneksi dan Sulawesi bagian Selatan agar tidak Oversupply. Tidak hanya itu, Komisi VI DPR RI juga mendukung PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan digitalisasi dari hulu sampai hilir, end to end dalam program	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI Dengan PT PLN (Persero).

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			transformasi perusahaan guna memacu gerak, cara fikir baru hingga pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan juga mendukung PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mempelopori akselerasi ekosistem kendaraan listrik Electric Vehicle (EV) dan kompor induksi sebagai upaya Demand Creation sekaligus sebagai pengalihan konsumsi energi berbasis impor menjadi energi domestik.	
2.	PT Pertamina (Persero)	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Pertamina. Adapun pokok bahasan di dalam RDP tersebut adalah Mengenai Kinerja holding dan subholding Pertamina. Rapat tersebut menghasilkan beberapa catatan, antara lain Komisi VI DPR RI mendukung kinerja PT Pertamina (Persero) dalam memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) ke seluruh penjuru Indonesia dan juga mendesak pemerintah untuk dapat melakukan pembayaran atas piutang PT Pertamina (Persero) untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga mendukung penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yang mengikuti harga keekonomian minyak dunia untuk menjamin kesehatan keuangan PT	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI Dengan PT Pertamina (Persero).

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Pertamina (Persero) dalam menjalankan penugasan pemerintah, serta meminta pemerintah untuk menambah kuota Solar Subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disertai dengan pengawasan distribusi yang ketat agar tepat sasaran. Di sisi lain, Komisi VI DPR RI juga meminta adanya peraturan yang lebih jelas dari pemerintah terkait pembatasan kendaraan yang bisa menggunakan Solar subsidi, mendesak pemerintah untuk mengubah mekanisme kompensasi Solar menjadi mekanisme subsidi sepenuhnya serta meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk segera membahas penyesuaian harga BBM dan LPG Subsidi dan Non Subsidi dikarenakan disparitas harga subsidi dan non subsidi yang semakin melebar dan gejolak harga Internasional yang tidak menentu	
3.	BUMN Transportasi PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Perum Damri.	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Terkait Persiapan Hari Raya Idul Fitri, Komisi VI DPR Panggil BUMN Transportasi. Selasa (29/3) Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BUMN Transportasi membahas terkait persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Adapun BUMN Trasportasi yang hadir adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Perum Damri. Seluruh perusahaan BUMN	Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BUMN Transportasi membahas terkait persiapan

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Transportasi tersebut menghadirkan Direktur Utamanya dalam Rapat Dengar Pendapat ini. Dalam RDP ini Komisi VI DPR RI mengingatkan seluruh Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran BUMN untuk menjaga keharmonisan bermasyarakat dan menjunjung tinggi AKHLAK dan tidak melontarkan sentimen SARA. Komisi VI DPR RI juga mendukung upaya PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Perum DAMRI dalam memastikan kesiapan BUMN transportasi menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Perum DAMRI untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan armada transportasi untuk arus mudik Idul Fitri 2022 yang memadai secara jumlah dan kualitas, memperhatikan protokol kesehatan, menjaga kebersihan, menjamin keselamatan penumpang serta mempersiapkan mitigasi bencana dalam rangka memastikan pelaksanaan arus mudik yang aman, nyaman dan lancar.	menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Komisi VI DPR RI meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Perum DAMRI untuk melakukan koordinasi dengan instansi Kementerian/Lembaga terkait kelancaran dan kebijakan tarif angkutan mudik yang terjangkau bagi masyarakat, serta meminta BUMN sektor transportasi untuk berkomitmen melakukan interkonektivitas angkutan darat dan laut sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan arus mudik Idul Fitri 2022.	
4.	HIMBARA (BRI, Bank Mandiri, BNI dan BTN)	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI Bahas Akses Perbankan Masyarakat Dengan HIMBARA Rabu (30/3). Komisi VI DPR RI siang ini menggelar Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan HIMBARA (BRI, Bank Mandiri, BNI dan BTN) membahas terkait peningkatan Akses Perbankan Masyarakat. RDP yang dipimpin langsung oleh Bapak Faisol Riza, Ketua Komisi VI DPR RI dimulai sekitar pukul 10.30 wib. Rapat diawali dengan menerima penjelasan dari masing-masing Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero)	Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan HIMBARA (BRI, Bank Mandiri, BNI dan BTN).

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. terkait perkembangan kinerja perusahaan di Tahun 2021. Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja BUMN Perbankan yang tetap baik di tengah kondisi Pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, Komisi VI DPR RI juga meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. untuk melakukan beberapa hal, antara a). terus berupaya meningkatkan akses perbankan masyarakat melalui berbagai channel layanan perbankan khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah yang belum bankable. b). melaksanakan program-program kerja dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat. c)/ bersinergi dan selalu berinovasi dalam rangka memperluas market share Bank BUMN secara nasional, regional maupun global serta meningkatkan kinerja perusahaan. d.) menjamin kualitas layanan dan keamanan transaksi perbankan khususnya melalui channel digital, dan e). melakukan pendampingan kepada pelaku usaha kecil UMKM dan Ultra Mikro dalam rangka	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			meningkatkan daya saing para pelaku usaha tersebut. Khusus terkait jelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, Komisi VI DPR RI meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. untuk mengantisipasi naiknya transaksi masyarakat, serta mengantisipasi dampak situasi perekonomian global dan potensi inflasi.	
5.	Kementerian Perdagangan	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI Panggil Eselon I Kemendag Bahas Pengendalian Harga Pangan. Komisi VI DPR RI kembali memanggil Kementerian Perdagangan RI untuk membahas pengendalian harga pangan jelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Kali ini Komisi VI DPR RI sengaja memang para eselon I, yakni Dirjen Perdangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, serta Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Bapak M. Hekal, Wakll Ketua Komisi VI DPR RI ini menghasilkan beberapa catatan dan rekomendasi, antara lain Komisi VI DPR RI meminta Dirjen	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan,

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI agar mengawasi keberadaan stok, distribusi dan stabilitas harga pangan dan bahan pokok, khususnya dalam menghadapi bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022/1443 H. Tidak hanya itu, Komisi VI DPR RI juga meminta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI agar memiliki mitigasi risiko jangka pendek, menengah dan panjang yang akan dijalankan pemerintah serta dilaporkan kepada Komisi VI DPR RI secara berkala, dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan sehingga dapat mencapai titik harga keseimbangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Terkait polemik minyak goreng yang terjadi belakangan ini, Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian Perdagangan RI melakukan audit distribusi minyak goreng terkait hasil kebijakan DMO dan DPO, serta meminta Dirjen Perdagangan	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI untuk mengkaji harga-harga acuan kebutuhan pokok yang ada di masyarakat, demi kepentingan petani dan konsumen.	
6.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI Minta KPPU tindak Tegas Pelaku Usaha Yang Langgar Ketentuan. Kamis (31/3) Komisi VI DPR RI hari ini gelar Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). RDP ini membahas terkait kinerja KPPU dalam penanganan perkara larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta kinerja badan perlindungan konsumen nasional dalam memberikan perlindungan konsumen. Dalam pertemuan ini Komisi VI DPR RI mengajak Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional agar ikut serta dalam mengawasi keberadaan stok, distribusi dan stabilitas harga pangan dan bahan pokok, khususnya dalam menghadapi bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022/1443 H.	Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN),

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Tidak hanya itu, Komisi VI DPR RI juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk memonitor perilaku pelaku usaha bidang pangan demi menjaga persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen. Pada kesempatan ini juga Komisi VI DPR RI mendukung penguatan Lembaga dan Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang wajib diimbangi dengan kinerja yang lebih baik, serta mengusulkan agar adanya Undang-Undang yang mengintegrasikan Undang-Undang persaingan usaha yang sehat dan Undang -Undang perlindungan konsumen. Melalui pimpinan rapat, Komisi VI DPR RI meminta agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan sanksi tegas berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang, khususnya pelaku usaha di bidang pangan, dan meminta KPPU untuk melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan kartel dan penggunaan dana BPDPKS sebesar 7,6 T dengan klaim untuk atasi kelangkaan minyak goreng. serta meminta KPPU agar terus mengawasi	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat terutama terkait kenaikan harga/penurunan harga komoditas barang pokok dan barang penting yg tidak wajar. Sementara itu, disisi lain Komisi VI DPR RI meminta kepada BPKN agar memastikan pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha untuk proaktif dalam upaya perlindungan konsumen serta lebih meningkatkan peran dalam merespon dinamika dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat	
7.	BUMN Holding Pangan	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke BUMN Holding Pangan di Bandung, Subang dan Indramayu. Kunjungan kerja spesifik kali ini, dilaksanakan untuk mengetahui progres program kerja holding sektor pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional, mengetahui kinerja operasional dan keuangan dari BUMN Holding Pangan. Selain itu, Kunker Spesifik kali ini juga turut menggali permasalahan dan kendala yang dihadapi BUMN Holding Pangan serta mendapatkan strategi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.	Kunjungan Kerja Spesifik ke Indramayu, Subang dan Bandung.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
8.	PT Krakatau Steel (Persero)	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Komisi VI DPR RI melakukan RDP dengan Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero), Senin 11 April 2022. Dalam RDP tersebut, Komisi VI DPR RI membahas terkait industri baja nasional. Komisi VI DPR RI meminta PT Krakatau Steel (Persero) untuk melanjutkan transformasi dan efisiensi di segala lini dan memperbaiki kinerja termasuk pada anak perusahaan. Selain itu, Komisi VI DPR RI meminta PT Krakatau Steel (Persero) agar terus melanjutkan kebijakan Pemerintah dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dalam RDP tersebut, Komisi VI DPR RI juga menyatakan dukungan terhadap proses hukum atas hasil audit investigasi BPK dan BPKP terhadap kasus blast furnace. Untuk itu, Komisi VI DPR RI mengusulkan untuk dilakukan Rapat Kerja dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dalam rangka membahas persoalan impor baja.	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Krakatau Steel (Persero)
9.	PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara;	Panja Penyelamatan Garuda Indonesia Komisi VI DPR RI melakukan rapat dengan Wakil Menteri BUMN II, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk dan tujuh direksi BUMN yang terkait dengan usulan proposal penyelesaian utang PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Senin 11 April	Rapat Panja Penyelamatan Garuda Indonesia Komisi VI DPR RI dengan Wakil

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		c. Kebijakan Pemerintah	2022. Dalam rapat tersebut, Panja Penyelamatan Garuda Indonesia Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia (Persero) untuk melaksanakan secara konsisten terkait business plan, optimalisasi rute, dan pendapatan lainnya. Selain itu, Panja Penyelamatan Garuda Indonesia Komisi VI DPR RI menyetujui usulan PMN ke PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp 7,5 Triliun dari cadangan pembiayaan investasi APBN 2022 yang akan dicairkan jika PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk mencapai kesepakatan damai dengan krediturnya dalam PKPU.	Menteri BUMN II, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk dan tujuh direksi BUMN yang terkait dengan usulan proposal penyelesaian utang PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.
10.	Kementerian Perdagangan	a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI pada tanggal 11 s.d 13 mengadakan kujungan kerja di Pasar Tohaga-Cibinong Kab.Bogor dan Pasar Suryakencana Kota Bogor didampingi Kementerian Perdagangan, PT Berdikari, Perum Bulog, satgas Pangan, ID Food, JAPPDI, serta Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Hasil dari Kunjungan kerja Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI ini	Kunjungan Kerja Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI.

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			didapati beberapa harga komoditi yang relative tinggi seperti daging, tempe-tahu, dan minyak goreng curah dimana harganya masih diatas 14000. Namun ada juga beberapa komoditi yang mengalami penurunan harga seperti telor hal tersebut harus dijaga agar harganya tidak terlalu menurun yang dapat menyebabkan kerugian para peternak. Perihal permasalahan diatas Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI mendorong kepada Kementerian Perdagangan berkerjasama dengan lembaga/instansi terkait untuk lebih concen terhadap ketersediaan dan stabilitas harga Pangan dan barang kebutuhan pokok terutama minyak goreng, daging, telor, dan kedelai dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dengan tidak merugikan para peternak. Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan berkerjasama dengan lembaga/instansi terkait untuk terus melakukan pengawasan agar kebutuhan pokok pangan dan barang masyarakat terpenuhi terutama menjelang hari raya Idul Fitri.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. Dirjen Migas Kementerian ESDM b. Kepla BPH Migas c. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Kegara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Dampak kenaikan harga minyak mentah dunia b. Mekanisme Distribusi kuota dalam mengatasi kelangkaan solar c. Kenaikan harga LPG non subsidi d. Lain-lain	
2.	Duta Besar Jerman	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	*Courtesy call* terkait: 1. Transisi Energi 2. Masukan mengenai RUU tentang EBT	
3.	DPP Energi Milenial Indonesia Raya	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Audiensi terkait Isu Energi	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Dirjen Minerba Kementerian ESDM	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Kegara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Penjelasan tentang proses perizinan usaha pertambangan serta pencabutan IUP b. Lain-lain	
5.	Dirut PT Pertamina (Persero)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Penjelasan tentang Ketahanan BBM b. Penjelasan kinerja pertamina hulu c. Persiapan kilang menghadapi lebaran d. Progres GRR Tuban e. Lain-lain	
6.	Kunjungan Kerja Spesifik pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan kerja spesifik ke: a. Provinsi Sumatera Utara Peninjauan ke TBBM Pertamina Medan b. Provinsi Jawa Barat Peninjauan ke TBBM Pertamina di Cikampek Kabupaten Karawang c. Provinsi Sulawesi Selatan Peninjauan ke TBBM Pertamina Makassar	
7.	a. Dirjen ILMATE Kemenprin b. Dirjen Minerba Kementerian ESDM	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara;	a. Penjelasan terkait potensi dan sebaran logam tanah jarang	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	c. Direktur Utama PT Timah (Persero)	c. Kebijakan Pemerintah	b. kesiapan regulasi terkait pengembangan dan pemanfaatan logam tanah jarang c. kesiapan industri hilir dalam pemanfaatan logam tanah jarang d. tata kelola Niaga Pertimahan e. Perkembangan Industri Hilir Timah f. Lain-lain	
8.	a. Dirjen Minerba Kementerian ESDM b. Gubernur Bangka Belitung c. Gubernur Sumatera Selatan d. Gubernur Jawa Barat e. Gubernur Kalimantan Barat f. Gubernur Kalimantan Selatan g. Gubernur Kalimantan Tengah h. Gubernur Kalimantan Timur	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Strategi kebijakan Pemerintah dalam penanganan kegiatan illegal mining b. Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat aktivitas ilegal mining c. Kendala dalam penanganan ilegal mining d. Lain-lain	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	i. Gubernur Kalimantan Utara dan j. Gubernur Sulawesi Tenggara			
9.	a. Direktur Utama PT Semen Indonesia b. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia dengan menghadirkan Direktur Utama Sub Holding	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Evaluasi kinerja Tahun 2021 dan rencana kerja Tahun 2022 b. Kepastian pasokan batubara dan gas untuk industri semen dan pupuk	
10.	Menteri ESDM RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Realisasi DIPA TA 2022 Triwulan I (menyampaikan data berdasarkan Satuan III per Eselon II [Direktorat] di masing-masing Eselon I) b. Strategi dalam menghadapi dampak kenaikan harga minyak global c. Sistem informasi Mineral dan Batubara Aantar Kementerian/Lembaga (SIMBARA) d. Progres capaian bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025 e. Lain-lain	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
11.	a. Dirut Indonesia Commodity & Derivative Exchange (ICDX); b. Dirut Jakarta Future Exchange (JFX)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Penjelasan mekanisme perdagangan komoditi timah di bursa komoditi berjangka b. Perspektif ICDX dan JFX terkait pengaturan royalti pertambangan timah c. Lain-lain	
12.	Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunjungan kerja pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke: a. Provinsi Kepulauan Riau Peninjauan ke Pertambangan Pasir Laut b. Provinsi Jawa Barat Peninjauan ke PT Kalbe Morinaga Industri, industri makanan dan PT Kalbe Nutritionals di Cikampek Kabupaten Karawang c. Provinsi Papua Peninjauan ke PLTMG 50 MW PT PLN (Persero)	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Penanggulangan Bencana	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Kesehatan RI dan Menteri PAN dan RB RI	Komisi VIII DPR RI dan DPD RI, serta Pemerintah RI sepakat untuk menghentikan pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana pada Tingkat I karena tidak ada kesepakatan mengenai nomenklatur kelembagaan BNPB. Komisi VIII DPR RI tetap berpegang pada RUU Penanggulangan Bencana bahwa nomenklatur kelembagaan BNPB disebutkan secara eksplisit dalam RUU Penanggulangan Bencana, sementara Pemerintah tidak mau menyebutkan secara eksplisit dan pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga ini akan diatur dalam Peraturan Presiden untuk memberikan fleksibilitas kepada Presiden.	RUU Penanggulangan Bencana telah dibahas selama 9 kali Masa Persidangan tetapi tidak pernah mencapai kesepakatan dalam hal kelembagaan BNPB

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Agama RI	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI mengenai penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M	1. Besaran rata-rata BPIH Tahun 1443 H/2022 M per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar	Asumsi penyusunan BPIH adalah kuota 50% dari kuota tahun 2019 yakni

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Rp81.747.844,04, yang terdiri dari: a. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah Rp39.886.009, meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, biaya hidup (*living cost*), dan biaya visa. b. Biaya protokol kesehatan per jemaah sebesar Rp808.618,80. c. Biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji per jemaah sebesar Rp41.053.216,24. Dengan biaya protokol kesehatan dan penggunaan nilai manfaat tersebut di atas, maka secara keseluruhan beban nilai manfaat sebesar	sebanyak 101.660 haji regular dan 8.840 haji khusus

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Rp4.228.422.095.519,71 meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. 2. Alokasi Virtual Account (VA) Jemaah Lunas Tunda sampai dengan Juni 2022 adalah rata-rata Rp4,69 juta per jemaah menjadi sumber pelunasan Bipih 2022, dengan catatan: a. Pengelolaan setoran lunas tunda 2021 dan 2022 dilakukan oleh BPKH sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 494 tahun 2020 diktum Kedua huruf b dan c; b. Sumber dana tambahan alokasi Virtual Account Jemaah lunas tunda berasal dari akumulasi	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			nilai manfaat BPKH sampai dengan tahun 2021 dari nilai manfaat BPKH tahun 2022; c. Tambahan alokasi Virtual Account BPKH tahun 2021 dihitung sebesar 3,33% terhadap nilai manfaat 2021 atau rata-rata sebesar Rp1,58 juta per jemaah. Sedangkan alokasi Virtual Account BPKH tahun 2022 untuk Jemaah lunas tunda sebesar 0,65% terhadap target nilai manfaat BPKH tahun 2022 atau sebesar Rp300 ribu per jemaah, sehingga alokasi Virtual Account BPKH total rata-rata Rp4,69 juta per jemaah lunas tunda terpenuhi. 3. Panja Komisi VIII DPR RI tentang BPIH Tahun 1443	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			H/2022 M dan Panja Pemerintah menyepakati bahwa: a. Apabila terdapat perubahan jumlah kuota haji sebagaimana diasumsikan pada angka 1 di atas, maka akan dilakukan pembahasan bersama kembali antara Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah untuk menye-suaikan besaran BPIH dengan jumlah kuota terbaru. b. Tidak ada rencana pengenaan biaya untuk PCR di Arab Saudi pada saat kepulangan jemaah dan biaya PCR dalam negeri dibebankan kepada anggaran Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			c. Jumlah lama masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi sebanyak 41 (empat puluh satu) hari. d. Bipih untuk Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing KBIHU tidak mendapat bantuan/dukungan dari dana nilai manfaat keuangan haji, dan dana efisiensi operasional haji, dan dana sumber lainnya yang sah, sehingga besaran rata-rata Bipih untuk PHD dan Pembimbing KBIHU Tahun 1443 H/2022 M adalah sebesar Rp81.747.844 per orang. e. Jumlah PHD per kloter sebanyak 2 orang dalam rangka memaksimalkan peruntukan kuota haji tahun 1443H/2022M	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			untuk jemaah haji lunas tunda tahun 1441H/2020M. f. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Jemaah haji dan optimalisasi penye-rapan anggaran, dapat dilakukan realokasi/ perge-seran antar komponen ang-garan yang telah ditetapkan, yang diatur melalui Keputu-san Direktur Jenderal Penye-lenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI sete-lah melakukan konsul-tasi dengan Komisi VIII DPR RI. 4. Panja Komisi VIII DPR RI tentang BPIH Tahun 1443 H/2022 M dan Panja Pemerintah menyepakati untuk memaksimalkan	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			pelayanan kepada jemaah haji tahun 1443H/2022M dengan melakukan peningkatan volume makan jemaah haji di Mekkah dan Madinah dari 2 (dua) kali per hari menjadi 3 (tiga) kali per hari. 5. Panja Komisi VIII DPR RI tentang BPIH Tahun 1443 H/2022 M dan Panja Pemerintah menyepakati pengadaan mata uang Saudi Arabian Riyal (SAR) untuk biaya operasional penyeleng-garaan ibadah haji di Arab Saudi Tahun 1443 H/2022 M dan biaya hidup (*living cost*) jemaah haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan harga terbaik dan dengan prinsip syari'ah, efisien, optimal, kehati-hatian, serta likuid.	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Kementerian Sosial RI	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI mengenai perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru Kementerian Sosial sesuai dengan Perpres Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial	1. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui realokasi anggaran sesuai dengan pagu SOTK yang baru Kementerian Sosial, meliputi pagu awal sebesar Rp78.256.327.121.000 dan realisasi anggaran sampai 12 April 2022 sebesar Rp29.675.333.620.713 serta realokasi anggaran yang akan didistribusikan sesuai dengan SOTK baru sebesar Rp48.580.993.500.287. 2. Komisi VIII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial RI sebesar Rp11.002.589.150.000, meliputi bantuan atensi anak yatim piatu tahun 2022 sebesar Rp9.656.692.800.000, perlindungan sosial korban bencana alam	Realokasi secara rinci akan didalami dalam RDP dengan Eselon I Kementerian Sosial

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Rp350.496.500.000, perlindungan sosial korban bencana sosial dan non-alam Rp50.290.000.000 serta Program Keluarga Harapan (PKH) Rp945.109.850.000.	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja ke Arab Saudi dan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Palangkaraya (Kalteng) dan Samarinda (Kaltim)	Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M di Arab Saudi dan di Kaltim, serta penyaluran bantuan sosial dan kesiapsiagaan bencana.	1. Komisi VIII DPR RI ingin memastikan bahwa persiap-an penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M sudah dilaksanakan baik di Arab Saudi maupun di Indonesia. 2. Komisi VIII DPR RI ingin memastikan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat prasejahtera dan masyarakat yang terdampak Covid-19 benar-benar tepat sasaran. 3. Komisi VIII DPR RI ingin memastikan bahwa kesiap-siagaan bencana terus dilakukan untuk meminima-lisir jumlah korban jiwa dan harta apabila terjadi bencana.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Panja RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Membahas draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (POM).	Ada kegiatan Rapat Panja	Panja akan melakukan pembahasan draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan pada Masa Persidangan IV TS 2021-2022.
2.	Rapat Panja RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Panja menugaskan Tim Asistensi untuk mempersiapkan pendalaman substansi RUU sesuai masukan anggota Panja.		

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian/Lembaga	Rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran.	Tidak ada	....
2.	Badan Anggaran	a. Pembahasan alokasi anggaran kementerian/lembaga; b. Pembahasan RUU Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.	Tidak ada	....

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RDP dengan BP2MI	Membahas mengenai: 1. Kesiapan dan progres optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 2. langkah penyelesaian perpanjangan kontrak kerja PMI, pemulangan PMI dari Malaysia dan tindak lanjut percepatan penyelesaian MOU dengan negara-negara tujuan penempatan; 3. Kesiapan Pemerintah dalam proses penempatan Pekerja	Komisi IX DPR RI mendesak dan meminta BP2Ml untuk: a. Segera menerbitkan Per Kaban untuk mendukung pelaksanaan program JKN bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI), mensosialisasikan dan melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan di negara tujuan penempatan. b. segera menyelesaikan perpanjangan kontrak kerja PMI dan MOU dengan negara penempatan. c. Memberikan jaminan kepulangan PMI di tahun 2022 sampai daerah asal. d. Memprioritaskan pelatihan peningkatan keahlian dan keterampilan bagi CPMI melalui LPK swasta dan BLK milik Kemnaker berstandar internasional e. Mewujudkan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia dan negara tujuan penempatan lainnya yang masuk pada masa endemik	UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;	
2.	RDP Panja Komisi IX DPR RI mengenai Pengawasan terhadap penanganan TKA dengan Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker RI, Walikota Cilegon, Bupati Morowali, dan BUpati Mimika	Membahas dampak investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pekerja atas penempatan TKA	Panja Komisi IX DPR RI mengenai Pengawasan terhadap penanganan TKA mendapatkan masukan dari pihak-pihak terkait dan selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi Panja Komisi IX DPR RI mengenai Pengawasan terhadap penanganan TKA dalam menyusun laporan akhir.	
3.	Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI dan RDP dengan Ketya DJSN dan Dirut BPJS Kesehatan	• Membahas terkait perkembangan peninjauan manfaat jaminan Kesehatan sesuai KDK dan kelas rawat inap standar; • Membahas peta jalan peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan JKN	Komisi IX DPR RI Komisi IX PR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, DJSN dan BPJS Kesehatan untuk melakukan penyelarasan peta jalan dan menyepakati definisi dan kriteria pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sesuai dengan peta jalan Bappenas, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dan mempertimbangkan kesiapan fasilitas kesehatan, terutama kesiapan sarana prasarana dan SDM Kesehatan dengan meningkatkan mutu layanan, dan implementasinya didahului uji coba.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Komisi IX DPR RI melakukan FGD dengan BPJS Ketenagakerjaan, Direktur PHI dan Jamsos Kemenaker RI, DJSN, dan Pakar BPJS TK	Membahas terkait optimalisasi pelaksanaan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	Komisi IX DPR RI mendapat masukan terhadap upaya optimaliasasi pelaksanaan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari pihak-pihak terkait.	
5.	• Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan	Membahas detil rencana pelaksanaan program kerja tahun 2022 untuk penguatan pengawasan obat dan makanan melalui pemberdayaan asyarajat dan kemitraan	Komisi IX PR RI mendesak Badan POM RI untuk: a. membuat roadmap pengembangan loka-loka di kabupaten/kota seluruh Indonesia guna memperluas jangkauan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat; dan b. menjalin kerjasama dengan pihak terkait lainnya termasuk dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi.	
	• RDPU dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH. LLM., Prof. dr. Budi Sampurna, DFM, SH., Sp.F(K)., Sp.KP., dan Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F(K), SH., LLM., FACLM.	Membahas tentang tugas pokok dan fungsi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi profesi kedokteran Indonesia.	Komisi IX DPR RI meminta PB IDI bersama-sama dengan Letjen TNI (Purn). Prof. DR. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) untuk secepatnya menyelesaikan perbedaan pendapat terkait penerapan etika kedokteran yang ada secara internal dengan pendekatan kekeluargaan dan bermartabat, sekaligus meminta IDI untuk lebih terbuka dengan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			perbaikan organisasi khususnya terkait dengan pengawasan dan akuntabilitas/transparansi sesuai dengan kebutuhan dokter dan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya demi peningkatan derajat kesehatan masyarakay Indonesia.	
6.	Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI	Membahas tentang perkembangan penyususnan *roadmap* percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 termasuk program penguatan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan	Komisi IX PR RI meminta BKKBN RI bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI untuk mempertajam upaya konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitive dengan melibatkankementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain termasuk organisasi keagamaan sesuai peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, demi mencapai target prevalensi *stunting* 14% di tahun 2024.	
7.	Rapat Panja Vaksin tentang Pengawasan Vaksin Covid-19 dengan Kepala BPOM , Dirjen Farmalkes dan Direktur PT. Biofarma	Membahas terkait upaya ketersediaan dan pemerataan vaksin covid-10	Komisi IX DPR RI menerima masukan dari Kepala BPOM dan Dirut PT Biofarma, selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi Panja Komisi IX DPR RI untuk pengawasan Vaksin COVID-19 dalam penyusunan laporan akhir.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
8.	Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Ri, Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes RI, Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Deputi SDM Kemenpan RB dan Reformasi Birokrasi.	Membahas Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia, termasuk Tenaga Kesehatan non ASN dan Tenaga Honorer	Komisi IX DPR RI mendesak untuk: - Memastikan tidak ada lagi pegawai selain yang berstatus PNS dan PPPK, pengangkatan tenaga Kesehatan non-PNS menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat November 2023. - Memastikan seluruh tenaga Kesehatan yang bekerja di fasilitas Kesehatan pemerintah mendapatkan pemenuhan kesejahteraan, khususnya menjamin keikutsertaan dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.	
9.	Rapat Panja Vaksin dengan Badan POM RI, Dirjen Farmalkes Kemenkes RI, Dirjen P2P Kemenkes RI dan Direktur Utama PT. Biofarma.	- Penjelasan terkait Upaya ketersediaan dan pemerataan Vaksin Covid-19 - Membahas terkait vaksin kadaluwarsa.	Komisi IX DPR RI menerima informasi dan masukan dari Kepala BPOM dan Dirut PT Biofarma, selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi Panja Vaksin Komisi IX DPR RI untuk pengawasan Vaksin COVID-19 dalam penyusunan laporan akhir dari Panja.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	RUU tentang Praktik Psikologi	Rapat Panja dengan Pemerintah (Konsinyering)	Menyepakati substansi pengaturan mengenai keprofesian, dimana substansi krusial organisasi profesi telah mendapatkan titik temu dan kesepakatan rumusan norma. Dalam bab Organisasi Profesi diatur dengan rumusan generik dan memberikan substansi yang akan didelegasikan dalam peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah.	Pembahasan RUU Praktik Psikologi akan dilanjutkan pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022.
2	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.	Rapat Komisi X DPR RI dengan Kepala BKD beserta jajarannya.	Komisi X DPR ingin mendapatkan informasi perkembangan penyusunan NA dan Draft RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.	Anggota Komisi X DPR RI memberikan masukan untuk penyempurnaan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	RDPU Panja Kebijakan Kurikulum dengan pakar membahas sinkronisasi regulasi kebijakan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe.	▪ Para pakar menyampaikan kritik terhadap adanya 3 kurikulum yang saat ini dilaksanakan di satuan Pendidikan, yaitu K13, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe, dimana seharusnya ditetapkan hanya 1 kurikulum. ▪ Khusus mengenai kurikulum prototipe perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.	
		RDP Panja Formasi GTK-PPPK dengan: 1. Pemda Kab Wonogiri, 2. Kab Pasuruan, 3. Kab Lampung Timur, 4. Kab Sanggau, dan 5. Kota Kupang	Menyampaikan permasalahan terkait seleksi guru PPPK, dimana untuk tahun 2022 tidak semua pemda mengusulkan formasi karena belum ada keyakinan anggaran yang bersumber dari APBN dengan skema DAU.	
		RDP Panja Formasi GTK PPPK dengan: 1. Pemda Provinsi DIY 2. Pemda Provinsi NTB, 3. Pemda Provinsi Kaltara, dan 4. Pemda Provinsi Sulbar	Menyampaikan permasalahan terkait seleksi guru PPPK, dimana untuk tahun 2022 tidak semua pemda mengusulkan formasi karena belum ada keyakinan anggaran yang bersumber dari APBN dengan skema DAU	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Kunjungan kerja spesifik untuk melakukan pengawasan permasalahan Guru PPPK dan kebijakan Kurikulum Merdeka ke: 1. Kota Makasar 2. Kabupaten Langkat 3. Kota Banjarmasin	**Kota Makasar** ▪ Pada Bidang Kurikulum Merdeka, pemangku pendidikan Kota Makassar menilai Kemendikbudristek RI tidak tegas dalam memutuskan kurikulum yang akan digunakan. ▪ Pemerintah Kota Makassar menerima informasi bahwa pembiayaan guru PPPK 2021 dan penyelenggaraan seleksi 1 Juta Guru PPPK ditanggung oleh Kemendikbudristek RI. Namun kenyataannya, kebijakan anggaran untuk gaji bagi guru yang lulus seleksi dibebankan ke APBD Kota Makassar. **Kabupaten Langkat** Terkait dengan program 1 juta PPPK di Kabupaten Langkat Belum semua di usulkan Dalam formasi PPPK karena terkait kemampuan keuangan daerah untuk penggajian. **Kota Banjarmasin** ▪ sumber anggaran untuk gaji dan tunjangan guru PPPK dengan skema dana transfer daerah (DTU) justru membebani APBD ▪ Penentuan formasi PPPK bukan berdasarkan data dapodik terbaru	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			sehingga ada perbedaan antara kebutuhan riil di sekolah dengan formasi PPPK yang disediakan, ▪ Kurikulum Merdeka baru dapat dilaksanakan di sekolah penggerak, dan saat ini sedang mendorong non sekolah penggerak untuk menerapkan kurikulum merdeka	
		Raker dengan Kemendikburistek RI membahas isu-isu strategis, khususnya evalusi seleksi guru PPPK.	1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Panselnas untuk menjamin 293.860 guru PPPK yang lulus seleksi PPPK tahap I dan tahap II segera mendapatkan NIP dan SK PPPK. 2. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Panselnas untuk memastikan 193.954 guru lulus *passing grade* mendapatkan formasi dan SK PPPK tanpa tes ulang, agar segera mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan KemenPAN-RB RI untuk membentuk peraturan untuk memberikan masa transisi bagi guru sekolah swasta yang lulus PPPK ditugaskan di sekolah asal.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		RDPU dengan DPP Ikatan Dosen Tetap Non-PNS	Mengusulkan skema afirmasi dalam seleksi PPPK dengan melakukan revisi peraturan teknis yang terkait, antara lain: 1) PermenPAN-RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021; dan 2) PermenPAN-RB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.	Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti dengan rapat bersama Kemendikbudristek RI
		Rapat intern Komisi X DPR RI	Panja Formasi GTK PPPK menyelesaikan masa kerja panjanya dan akan menyampaikan rekomendasi panjanya pada masa siding depan ke Kemendikbudristek RI Panja Kebijakan Kurikulum akan dilanjutkan masa kerjanya pada masa siding yang akan datang.	
2	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI	RDPU dengan Asosiasi Digital Marketing Indonesia (DIGIMIND) dan Yayasan Pencipta Panggung Hiburan Nasional (YPPHN)	1. YPPHN mengusulkan untuk adanya royalti ekonomi atas hak cipta dari para pencipta lagu dan meminta Komisi X DPR RI untuk menyampaikan aspirasi kepada Kemenparekraf/Baparekraf RI. 2. DIGIMIND mengusulkan adanya muatan materi pembelajaran digital marketing di SMK dan Balai Latihan Kerja.	Komisi X DPR RI akan menindaklanjutinya dengan rapat bersama Kemendikbudristek RI dan Kemenparekra/ Baparekraf RI

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3	Perpustakaan Nasional RI	RDP membahas evaluasi implementasi UU SSKCKR.	Komisi X DPR RI mendorong Perpusnas RI membuat kajian terhadap pelaksanaan UU SSKCKR diantaranya dalam bentuk perbandingan antara sebelum dan sesudah perubahan UU SSKCKR dengan memperhatikan hasil pemetaan selama 5 tahun (2015-2020) dan perbandingan jumlah judul terbitan dengan jumlah penduduk per provinsi.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	JENIS RAPAT	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	Penetapan Penggantian Pimpinan dari Fraksi Partai Golkar	Terdapat penggantian Pimpinan Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, yang semula Bapak Dito Ganinduto digantikan oleh Bapak H. Kahar Muzakir, sehingga susunan Pimpinan Komisi XI DPR RI sebagai berikut : 1. H. Kahar Muzakir (Ketua) 2. Dolfie O.F.P. (Wakil Ketua) 3. Dr. Achmad Hatari, SE, M.Si (Wakil Ketua) 4. Drs. Fathan (Wakil Ketua) 5. Dr. H. M. Amir Uskara, M.Kes (Wakil Ketua)	Rapat tanggal 28 Maret 2022

NO	JENIS RAPAT	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)	Pengelolaan Dana BPDPKS	Komisi XI DPR RI bersama dengan Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDPKS) menyepakati hal-hal sebagai berikut: 1. BLU BPDPKS dalam mengelola dana dari pelaku usaha perkebunan dan penyaluran dana akan dilakukan secara hati-hati, mentaati peraturan perundang-undangan dan memenuhi aspek akuntabilitas. 2. BLU BPDPKS dalam menyalurkan dana untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) akan menyempurnakan mekanisme pendanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dapat memberikan kemudahan pencairan dana dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas. 3. Komisi XI DPR RI akan mengundang Kementerian Keuangan untuk	Rapat tanggal 30 Maret 2022

NO	JENIS RAPAT	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			menyampaikan dan membahas perubahan pagu DIPA BLU BPDPKS Tahun Anggaran 2022 dari Rp5,8 triliun dengan proyeksi realisasi menjadi Rp73 triliun, khususnya yang terkait dengan kebijakan-kebijakan alokasi penggunaan dana dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan.	
3.	Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Bea dan Cukai	Permasalahan penanganan kasus-kasus penyelundupan dan kebijakan cukai rokok	Komisi XI DPR RI bersama dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut: 1. Komisi XI DPR RI masih memerlukan data dan penjelasan secara detail mengenai kasus-kasus penyelundupan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh kantor wilayah Bea Cukai DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau. 2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar senantiasa memperkuat perannya	Rapat tanggal 4 April 2022

NO	JENIS RAPAT	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			sebagai *community protector* melalui pengawasan terhadap barang-barang yang tergolong barang larangan dan pembatasan. 3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar meningkatkan upaya penanganan kasus-kasus penyelundupan dan pemberantasan rokok illegal tahun 2022 melalui penambahan dan mereposisi lokasi PSO, memperbaharui peta kerawanan yang disesuaikan dengan perubahan lingungan strategis, pemanfaatan teknologi informasi, sinergi dan koordinasi dengan berbagai aparat penegak hukum. 4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar meningkatkan kegiatan pengawasan melalui *cyber patrol* dan *cyber crawling* dalam merespon perubahan modus baru penjualan BKC ilegal maupun	

NO	JENIS RAPAT	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			NPP dari penjualan *offline* menjadi *online* di *marketplace*. 5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar terus mengoptimalkan strategi pengawasan dan penindakan melalui optimalisasi DBH CHT bidang penegakan hukum, optimalisasi Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), pelaksanaan IKU pemberantasan BKC ilegal, operasi pengawasan BKC ilegal serentak dan terpadu, pemanfaatan aplikasi pelaporan rokok ilegal (SIROLEG), penyempurnaan peraturan serta sistem di bidang cukai, dan penerapan *ultimum remedium* pelanggaran cukai.	
4.	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan	Uji Kelayakan *(Fit and Proper Test)* Calon Anggota DK OJK	Resume materi dari masing-masing Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (terlampir)	Rapat tanggal 6 April 2022

NO	JENIS RAPAT	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan	Uji Kelayakan *(Fit and Proper Test)* Calon Anggota DK OJK	Resume materi dari masing-masing Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (terlampir)	Rapat tanggal 7 April 2022
6.	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	Pengambilan Keputusan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2022-2027	Rapat Internal Komisi XI DPR RI memutuskan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2022-2027 sebagai berikut : 1. **Mahendra Siregar, SE, M. Ec** sebagai Ketua merangkap Anggota 2. **Mirza Adityaswara** sebagai Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota 3. **Dr. Dian Ediana Rae, SH, LL.M** sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota 4. **Inarno Djajadi** sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota 5. **Ir. Ogi Prastomiyono, MBA** sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian,	Rapat tanggal 7 April 2022

NO	JENIS RAPAT	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota 6. **Sophia Isabella Watimena, SE, CA, MBA** sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota 7. **Dr. Friderica Widyasari Dewi, SE, MBA** sebagai Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen	

LAPORAN DWI MINGGUAN
BADAN LEGISLASI (BALEG)

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1.	Badan Legislasi	1. Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pengambilan keputusan atas hasil Harmonisasi RUU tentang Provinsi Bali (tgl 28 Maret 2022, pukul 10.00 WIB).
		2. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka menerima audensi dari Pengurus Pusat Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Jatringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual (tgl 28 Maret 2022, pukul 12.00 WIB).
		3. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka menerima audensi dari Asosiasi Bupati Wilayah Adat Saireri dan Presidium Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (tgl 28 Maret 2022, pukul 13.00 WIB).
		4. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan DIM RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (tgl 28 Maret, pukul 13.00 WIB)
		5. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan Pengusul RUU atas RUU tentang Provinsi Kepulauan Papua Utara (tgl 30 Maret 2022, pukul 10.00 WIB).
		6. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka Harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), (tgl 30 Maret 2022, pukul 13.00 WIB).
		7. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan DIM RUU tentang Tindak Pidana Kekerasaan Seksual (tgl 4 April 2022, pukul 10.00 WIB).
		8. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Harmonisasi RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan. (tgl 4 April 2022, pukul 10.00 WIB).
		9. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka membahas hasil kajian harmonisasi RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. (tgl 4 April 2022, pukul 13.00 WIB).

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		10. Rapat Tim Perumus Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan DIM RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (tgl 5 April 2022, pukul 10.00 WIB).
		11. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka harmonisasi RUU tentang Provinsi Papua, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pengunungan Tengah.(tgl 5 April 2022, pukul 10.00 WIB).
		12. Rapat Panja dalam rangka Laporan tim Perumus ke Panitia Kerja terkait Pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (tgl 6 April 2022, pukul 10.00 WIB).
		13. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, dan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka Pengambilan Keputusan atas Hasil Pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (tgl 6 April 2022, pukul 13.00 WIB).
		14. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. (tgl 6 April 2022, pukul 15.00 WIB).
		15. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menko Polhukam, Menko Perekonomian dan Menkumham dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tgl 7 April 2022, pukul 10.00 WIB).
		16. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (tgl 8 April 2022, pukul 13.30 WIB).
		17. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (tgl 9 April 2022, pukul 13.00 WIB).

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		18. Kunjungan kerja Badan Legislasi dalam rangka mencari masukan terhadap RUU tentang Minuman Berakohol ke Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Papua Barat pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 April 2022.
		19. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (tgl 11 April 2022, pukul 20.30 WIB).
		20. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (tgl 13 April 2022, pukul 10.00 WIB).
		21. Rapat Tim Perumus/Tim Sinkronisasi Badan Legislasi dalam rangka perumusan/sinkronisasi materi muatan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (tgl 13 April 2022, pukul 16.00 WIB).
		22. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menko Polhukam, Menko Perekonomian dan Menkumham dalam rangka laporan panja atas hasil pembahasan dan pengambilan Keputusan hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tgl 13 April 2022, pukul 20.30 WIB).

LAPORAN DWI MINGGUAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	BKSAP - KSB	Penerimaan Delegasi Parlemen Rumania oleh Pimpinan BKSAP DPR RI dan GKSB DPR RI – Parlemen Rumania	Pimpinan BKSAP DPR RI dan GKSB DPR RI – Parlemen Rumania menerima Delegasi Parlemen Rumania yang terdiri dari Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Rumania – Indonesia, Hon. Mr. Stefan Musoiu dan Hon. Ms. Laura – Iuliana Scantei. Delegasi datang pada tanggal 28 Maret 2022 dan diterima oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana dalam acara welcoming dinner. Rangkaian acara dilanjutkan dengan Friendly Talk antara Wakil Ketua BKSAP DPR RI dan Delegasi Parlemen Rumania. Pada kesempatan tersebut, Pimpinan BKSAP DPR RI menyambut baik kunjungan oleh Delegasi Parlemen Rumania, serta berdiskusi dengan delegasi terkait penanganan Covid-19, situasi terkini Ukraina-Rusia, hasil sidang ke-144 IPU di Bali, dan potensi pariwisata Bali. Diharapkan kunjungan tersebut dapat membuka potensi kerja sama di berbagai bidang, termasuk penguatan hubungan antar-parlemen.	Tgl. 28 – 29 Maret 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Acara selanjutnya adalah Friendly Talk GKSB DPR RI – Parlemen Rumania bersama Komisi I DPR RI dan dilanjutkan Working Lunch pada tanggal 29 Maret 2022. Dalam Working Lunch, Delegasi dijamu oleh GKSB DPR RI – Parlemen Rumania, yang dipimpin oleh Nurul Arifin (F-PG) dan dihadiri pula oleh Ichsan Soelistio (F-PDIP) dan Nevi Zuairiana (F-PKS). Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Rumania mengapresiasi kunjungan yang dilakukan oleh Parlemen Rumania yang bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral dan membuka potensi kerjasama di berbagai bidang yang dapat bermanfaat bagi kedua negara. Anggota GKSB menambahkan pentingnya kerjasama di bidang agrikultur, pendidikan dan kesehatan. Delegasi Parlemen Rumania menekankan akan pentingnya peningkatan kerjasama ekonomi demi pemulihan pasca pandemi bagi kedua negara.	
2.	BKSAP - KSB	BKSAP SDGs Day “Optimalisasi Peran Diplomasi Parlemen Melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya” di Kantor Gubernur Aceh	Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyelenggarakan BKSAP SDG's Day yang bertemakan “Optimalisasi Peran Diplomasi Parlemen Melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya” di Kantor Gubernur Aceh. Mempimpin kegiatan tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera (F-PKS) menyampaikan bahwa BKSAP Day bertujuan untuk mendekatkan	29 Maret 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			DPR RI dengan kampus dalam topik yang secara umum dibahas yaitu mengenai pentingnya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dimana ada 17 (tujuh belas) poin penting utk diwujudkan sebagai kesepakatan global, dimana salah satunya terkait dengan pendidikan. Menjalankan fungsi diplomasi parlemen, BKSAP DPR RI telah sukses menyelenggarakan forum parlemen sedunia (IPU) ke-144 di Bali yang dihadiri ratusan anggota parlemen dari lebih 100 negara. Selanjutnya, Parlemen Indonesia/DPR saat ini tengah menyiapkan penyelenggaraan P-20 sebagai bagian dari engagement groups dalam jaringan kegiatan G-20, yang rencananya akan diselenggarakan pada awal Oktober mendatang. BKSAP SDG's Day Provinsi Aceh turut mengundang civitas akademika dari sejumlah perguruan tinggi, diantaranya Universitas Syiah Kuala, Universitas Teuku Umar, Universitas Iskandar Muda, dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Wakil Ketua BKSAP Ir. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) dan Anggota BKSAP Muslim, MM (F-PD), selain juga jajaran Pemprov Aceh yang dipimpin oleh Dr. Iskandar AP, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Berbagai hal mengemuka dalam sesi diskusi dan tanya jawab dengan civitas akademika antara lain terkait peran DPR dalam pengawasan kinerja pemerintah, penanggulangan kemiskinan, penanganan kelangkaan bahan kebutuhan pokok, kesempatan magang bagi para mahasiswa Aceh, pengendalian game online/situs yg dpt merusak perkembangan anak/remaja, pembenahan kurikulum serta berbagai upaya utk menumbuhkan kesadaran para mahasiswa atas pentingnya pendidikan. Diharapkan kegiatan ini dapat menjembatani kampus dengan DPR maupun pemerintah, sehingga terbuka berbagai kesempatan kerjasama/peluang bagi mahasiswa maupun masyarakat.	
3.	BKSAP - KSB	CC GKSB DPR RI – Parlemen Peru dengan Dubes Peru untuk Indonesia	Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Peru, Dyah Roro Esti Widya Putri (F-PG) menerima Duta Besar Peru untuk Indonesia, H.E. Mr. Luis Tsuboyama Galvan di Ruang Dubes, Gedung Nusantara III lt. 2. Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Peru menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Dubes Peru dalam pertemuan tersebut serta berharap Indonesia dan Peru dapat mengeksplor potensi kerjasama khususnya dibidang transisi energi, perubahan iklim, pariwisata dan ekonomi. Disampaikan pula hasil penyelenggaraan sidang IPU ke-144 yang mempertegas komitmen parlemen untuk bergerak dalam isu perubahan iklim,	31 Maret 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			perdamaian, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dubes Peru menyambut baik potensi kerjasama antara kedua negara serta menyampaikan harapan besar bagi Indonesia dan Peru dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hal tersebut juga membuka berbagai peluang kerjasama yang akan didukung dengan kerangka *Indonesia - Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement* yang rencananya akan di finalisasi tahun depan. Momentum presidensi kedua negara di berbagai organisasi regional dan internasional kiranya dapat menjadi penggerak untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Peru.	
4.	BKSAP - KSI	Sidang Virtual "Parliamentary Conference on the World Trade Organization"	Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon, diundang untuk menghadiri sidang virtual "Parliamentary Conference on the World Trade Organization (PCWTO)", pada Kamis, 31 Maret 2022. Dr. Fadli Zon yang merupakan anggota Steering Committee PCWTO hadir dalam *"the Forty-eight session of the Steering Committee"* yang salah satu agendanya mendiskusikan mengenai perkembangan terkini dalam negosiasi perdagangan multilateral serta rencana kerja PCWTO ke depan. Adapun Indonesia telah bergabung dalam keanggotaan Steering Committee sejak Februari	31 Maret 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			2015 pada sesi ke-33 SC PCWTO. Dengan memperhatikan masa keanggotaan empat tahun, Indonesia saat ini berada dalam masa jabatan kedua untuk SC PCWTO. Berdasarkan statistik kehadiran yang disusun oleh Sekretariat PCWTO, Indonesia tercatat aktif menghadiri SC PCWTO hingga 92.3%. Dalam kesempatan ini, Fadli menyampaikan bahwa "Indonesia percaya bahwa perdagangan harus tetap terbuka selama situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini karena ekonomi global perlahan pulih dari pandemi. Penting juga untuk mempertahankan peran sentral WTO sebagai lembaga utama bagi tata kelola perdagangan internasional global untuk memastikan semua negara memperoleh manfaat dari perdagangan internasional." Kemudian terkait akan diselenggarakannya sidang *12th WTO Ministerial Conference* dengan tema, *"Towards a sustainable and inclusive recovery: ambition to action"* pada 13 Juni 2022 di Jenewa, Swis, lebih lanjut Ketua BKSAP mengingatkan agar tema PCWTO sejalan dengan pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif, "kami ingin tema mencakup dua aspek secara khusus: Pertama, perdagangan sebagai sarana untuk memfasilitasi pencapaian SDGs pada tahun 2030. Dan kedua,	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			perdagangan sebagai sarana untuk mengintegrasikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke dalam ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan", tegas Fadli.	
5.	BKSAP - KSI	WFD Conference on Environmental Democracy Day 3: "Putting Environmental Democracy into Practice: What Needs to Happen?"	Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon, diundang untuk menjadi salah satu pembicara pada diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Westminster Foundation For Democracy (WFD): *WFD CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL DEMOCRACY Day 3: "Putting Environmental Democracy into practice: what needs to happen?"* , pada Kamis, 31 Maret 2022. Dalam diskusi ini Fadli menyampaikan pengalaman Parlemen Indonesia dalam mendukung terciptanya tata kelola lingkungan yang lebih demokratis. "Dari sisi legislasi, kami sedang dalam proses finalisasi RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai upaya penanganan krisis iklim. Kami juga telah mengadopsi Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk memasukkan pajak karbon." Lebih lanjut Fadli menjelaskan bahwa fokus parlemen tidak hanya pada mengesahkan RUU tersebut, tetapi juga mengedepankan bagaimana peraturan tersebut dapat memberikan jalan bagi praktik yang lebih demokratis.	31 Maret 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Selain itu DPR RI juga memiliki Green Economy Caucus (GEC), yang anggotanya berasal dari berbagai komisi dan berbagai fraksi. Kaukus secara aktif mempromosikan undang-undang hijau dan menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. “Kami menyadari bahwa upaya kami dalam menerapkan demokrasi lingkungan membutuhkan dukungan multi-*stakeholder* termasuk dari LSM dan komunitas internasional. Oleh karena itu, kami menjalin kerjasama yang erat dengan WfD melalui berbagai kegiatan,” ujar Fadli menambahkan. Sebagai penutup, Ketua BKSAP menegaskan kembali bahwa demokrasi lingkungan bukanlah agenda yang mudah. Diperlukan upaya perubahan transformatif daripada radikal, serta inisiatif dari bawah ke atas daripada dari atas ke bawah, dan keterlibatan publik yang didorong oleh warga negara alih-alih partisipasi publik yang didorong oleh pemerintah.	
6.	BKSAP	Rapim ke-29 BKSAP DPR RI	Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (F-PGerindra) memimpin Rapat Pimpinan BKSAP ke-29 yang berlangsung secara virtual pada Senin, 4 April 2022. Rapim turut dihadiri oleh jajaran Pimpinan BKSAP yaitu Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez (F-PDIP); Putu Supadma Rudana (F-	4 April 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			PD); Mardani Ali Sera (F-PKS); dan Achmad Hafisz Tohir (F-PAN). Rapim membahas program kerja BKSAP, antara lain rencana kunjungan diplomasi BKSAP sebagai tindak lanjut hasil sidang ke-144 IPU, untuk memperkuat hubungan antar parlemen dan komitmen parlemen dalam mengatasi perubahan iklim. Selain itu, juga dibahas rencana kegiatan rapat evaluasi sidang IPU 144 untuk menindaklanjuti beberapa komitmen yang telah diputuskan dalam sidang tersebut. Pimpinan BKSAP juga mendorong agar kunjungan GKSB dapat dilakukan tahun ini untuk menghindari penumpukan di akhir periode.	
7.	BKSAP - KSB	CC GKSB DPR RI – Parlemen Meksiko dengan Dubes Meksiko untuk Indonesia	Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Meksiko, Eko Hendro Purnomo (F-PAN) menghadiri courtesy call dengan Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, H.E. Mr. Armando G. Alvarez di Kedutaan Besar Meksiko. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Meksiko, Junico B.P. Siahaan (F-PDIP) dan Susi Syahdonna Marleny Bachsin (F-PGerindra). Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Meksiko berterima kasih atas undangan dari Dubes Meksiko untuk pertemuan tersebut serta berharap Indonesia dan Meksiko dapat mengeksplor potensi kerjasama khususnya dibidang perdagangan, pariwisata, seni	5 April 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dan budaya. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Meksiko yang telah berlangsung sejak tahun 1953, mengalami berbagai dinamika yang tentu saja mempererat hubungan kedua negara. Diharapkan pertemuan ini dapat berkontribusi sebagai upaya memperkuat kerjasama kedua negara, utamanya melalui jembatan diplomasi parlemen. Dubes Meksiko menyambut baik potensi kerjasama antara kedua negara serta menyampaikan harapan besar bagi Indonesia dan Meksiko. Indonesia dan Meksiko memiliki banyak kesamaan dimana kedua negara memiliki sejarah peradaban yang luas, demokrasi yang kuat, memiliki masyarakat yang multietnis, dan bonus demografi. Kesamaan - kesamaan inilah yang hendaknya dapat memacu semangat kerjasama antara kedua negara. Kedua negara diharapkan dapat terus meningkatkan hubungan dagang dan investasi, menemukan bidang - bidang baru yang memiliki potensi untuk kerjasama, dan meningkatkan interaksi antara pembuat kebijakan, bisnis, akademisi dan seniman kedua negara.	
8.	BKSAP - ABA	BKSAP SDGs Day Mataram	Kegiatan sosialisasi diplomasi parlemen BKSAP SDGs Day yang berlangsung pada Jumat (8/4/2022) di kantor Pemerintah Provinsi Nusa	8 April 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram, dihadiri pimpinan BKSAP dan unsur pemerintah provinsi, Pemerintah Kota Mataram, serta akademisi dan mahasiswa dari Universitas Mataram. Dalam paparannya Ketua BKSAP Dr.H. Fadli Zon, S.S., M.Sc menjelaskan melalui keanggotaan pada organisasi-organisasi regional maupun internasional, BKSAP secara konsisten menyuarakan kepentingan nasional Indonesia dalam berbagai isu-isu global penting. Dengan demikian berkontribusi secara signifikan pada upaya-upaya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia melalui diplomasi serta pada peran parlemen dalam merumuskan solusi bagi berbagai permasalahan dunia. Ketua BKSAP memberikan contoh mengenai kesuksesan penyelenggaraan IPU Assembly Ke-144 di Bali. Indonesia bertindak sebagai tuan rumah dan pada acara tersebut BKSAP juga berhasil mengawal kepentingan nasional Indonesia, khususnya melalui politik luar negeri bebas aktif yang tidak berpihak pada blok manapun. Target Indonesia dalam upaya memoderasi konflik Rusia-Ukraina berhasil dengan disetujuinya resolusi yang lebih mengutamakan solusi damai melalui peran parlemen di IPU, ketimbang hanya mengutuk negara tertentu saja.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Hal tersebut semata-mata karena parlemen perlu menonjolkan perannya dalam memediasi terutama untuk perdamaian serta bagaimana mencari solusi. Ini juga sesuai dengan konteks historis IPU sebagai lembaga yang didirikan untuk merealisasikan perdamaian dunia. Peran diplomasi parlemen juga dijelaskan secara komprehensif oleh tiga Wakil Ketua BKSAP, yaitu Gilang Dhiela Fararez, SH., LL.M., Putu Supadma Rudana, M.B.A., dan Ir. H. A. Hafisz Tohir. Mereka menyinggung berbagai peran diplomasi parlemen di sejumlah bidang seperti pendidikan, pariwisata, dan ekonomi.	
9.	BKSAP - KSB	Courtesy Call ketua GKSB DPR RI – Parlemen Amerika Serikat dengan Dubes AS	Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Amerika Serikat menghadiri pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia H.E. Mr. Sung Y. Kim, yang bertempat di Kediaman Duta Besar AS, Jakarta. Pertemuan membahas sejumlah hal terkait upaya peningkatan hubungan kerjasama RI-AS, terutama terkait kerjasama antar parlemen sebagai bentuk second track diplomacy. Ketua GKSB DPR RI-Parlemen AS Charles Honoris (F-PDIP) juga turut menyampaikan rencana kunjungan GKSB DPR-Parlemen AS pada Oktober mendatang. Sebagai negara demokrasi terbesar, Indonesia dan	12 April 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Amerika memiliki kesamaan interest terhadap isu global dan regional seperti stabilitas kawasan Laut Cina Selatan, perdagangan dan investasi, hingga upaya bersama mengurangi dampak perubahan iklim. DPR RI juga selalu mengapresiasi kerjasama vaksin senilai 65 juta dollar AS yang telah dijalankan pemerintah RI-AS. Hubungan bilateral yang baik antara Indonesia-Amerika Serikat juga mendapat apresiasi dari Duta Besar H.E. Sung Y. Kim. Dubes menilai masih terdapat banyak sektor potensial seperti energi terbarukan, infrastruktur kesehatan, konservasi maritim, hingga kerja sama terkait perubahan iklim yang perlu ditingkatkan. Terkait kepemimpinan Indonesia dalam G-20, Dubes menyatakan dukungan dan menekankan presidensi Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Ditengah situasi global yang terjadi saat ini, pihak AS mendorong Indonesia dan fora internasional dapat mengambil sikap dan bersuara agar konflik dapat segera berakhir. Dalam waktu dekat, Indo-Pasific Economic Framework (IPEF) atau kerangka kerja ekonomi kawasan Indo-Pasifik akan segera dirilis. Dubes AS berharap Pemerintah Indonesia dan DPR RI dapat mendukung dan mengambil bagian dalam	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			kerjasama ekonomi regional tersebut. Pertemuan turut dihadiri oleh Anggota GKSB DPR-Parlemen Amerika Serikat diantaranya Marinus Gea, SE (F-PDIP), G. Budisatrio Djiwandono (F-PG), dan Eddy Soeparno, SH, MH (F-PAN), serta didampingi oleh jajaran Counselor Kedutaan Besar AS.	
10.	BKSAP – KSB	Courtesy Call GKSB DPR RI Palestina dengan Dubes Mesir	GKSB DPR RI - Parlemen Palestina mengadakan Pertemuan dengan Dubes Mesir untuk Indonesia, H.E. Mr. Ashraf Sultan yang membahas rencana kunjungan Palestina melalui Mesir. Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Palestina, Dr. H. Syahrul Aidi Ma'azat (F-PKS) menyampaikan rencana kunjungan GKSB ke Palestina melalui Mesir. Selain ingin bertemu dengan Parlemen Mesir, GKSB juga bermaksud untuk meninjau fasilitas kesehatan/penyaluran bantuan masyarakat Indonesia kepada rakyat Palestina. Dubes Mesir menyambut baik rencana kunjungan tersebut serta mendukung agenda pertemuan yang disampaikan oleh Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Palestina. Selain itu, juga dibahas upaya peningkatan hubungan baik antara Indonesia - Mesir yang selama ini telah terjalin sangat baik, terutama di	12 April 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu peluang kerjasama yg bisa diambil adalah dengan pembangunan pabrik penyulingan minyak sawit di Mesir, karena permintaan masyarakat Mesir terhadap minyak kelapa sawit masih sangat tinggi.	
11.	BKSAP – KSB	Courtesy Call Anggota GKSB Mesir dengan Dubes Mesir H.E. Mr. Ashraf Sultan	GKSB DPR RI - Parlemen Mesir mengadakan Pertemuan dengan Dubes Mesir untuk Indonesia, H.E. Mr. Ashraf Sultan yang membahas rencana kunjungan ke Mesir di kediaman Duta Besar di Jakarta. Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Mesir, Drs. H. Guntur Sasono, M.Si (F-P.Demokrat) didampingi Anggota GKSB, H. Haruna, M.A., MBA (F-PKB) menyampaikan rencana kunjungan GKSB ke Mesir pada minggu ketiga di Bulan Agustus, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperingati hubungan bilateral kedua negara yang ke-75. Selain ingin melakukan pertemuan dengan Parlemen Mesir (Majlis An-Nowaab), GKSB juga bermaksud bertemu dengan *stakeholders* di Mesir terkait sektor perdagangan, Pendidikan dan pariwisata. Ketua GKSB DPR RI- Parlemen Mesir mengharapkan Duta Besar Mesir Untuk Indonesia dapat memberikan pandangan terkait rencana kunjungan dimaksud. Dubes Mesir menyambut baik rencana kunjungan tersebut serta mendukung agenda pertemuan yang	13 April 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			disampaikan oleh Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Mesir. Selain itu, juga dibahas upaya peningkatan kerjasama antara Indonesia - Mesir yang selama ini telah terjalin sangat baik, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu peluang kerjasama adalah investasi pembangunan pabrik alat-alat kelistrikan di Indonesia yang ramah lingkungan dengan jaminan keselamatan. Duta Besar juga mempersilahkan Anggota GKSB DPR RI -Parlemen Mesir untuk memberikan informasi terkait ekspor perikanan beku kepada stake holder perdagangan di Mesir dan akan membantu peluang Kerjasama yang akan terbentuk.	
12.	BKSAP – KSB	Rapat Intern GKSB Equador	GKSB DPR RI - Parlemen Ekuador menggelar rapat internal untuk membahas program kerja dan rencana kunjungan ke Quito, Ekuador (13/4/2022). Rapat juga mengagendakan sejumlah pertemuan dengan Duta Besar Ekuador di Jakarta, untuk mendapatkan masukan terkait isu terkini dan potensi kerjasama kedua negara. Rapat internal dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Ekuador Vera Febyanthy, M.Si (F-PD) dan dihadiri oleh Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Ekuador diantaranya Tubagus Haerul Jaman, SE (F-PG), R. Imron Amin, SH, MH (F-	13 April 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			PGerindra) dan Muhammad Syafrudin (F-PAN). Indonesia merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-12 dan importir terbesar ke-25 bagi Ekuador. Dalam 5 tahun terakhir, tren nilai ekspor Ekuador ke Indonesia mengalami peningkatan hingga 60%. Data World Bank menyebut Indonesia menjadi mitra dagang tebesar ke-3 bagi Ekuador di ASEAN.	
13.	BKSAP - KSB	Ketua BKSAP & Ketua GKSB DPRI – Parlemen Palestina menerima Mr. Moneer Saeed, Secgen Global Coalition for Al Quds and Palestine & PCOM	Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) menerima Sekretaris Jenderal Global Coalitions for Quds and Palestine, Mr. Moneer Saeed pada hari Rabu, 13 April 2022 di Gedung Nusantara III lt. 2. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Palestina, Dr. H. Syahrul Aidi Ma'azat (F-PKS), Mr. Muslim Imran (Chairman PCOM Malaysia), Dr. Ahed Abulata (Dewan Ulama Turki), Mr. Khalid Amer dan Heriyanto (Biro PCOM Indonesia). Ketua BKSAP menyampaikan semangat dan motivasi DPR RI dalam mendukung dan tercapainya Kemerdekaan Palestina, dimana hal tersebut sejalan dengan Pembukaan UUD 1945. Perjuangan untuk Palestina adalah salah satu fokus dari diplomasi parlemen Indonesia di kancah internasional. Disampaikan juga bahwa GKSB DPR RI - Parlemen Palestina sejatinya merupakan focal point dari DPR RI dalam segala isu - isu Palestina	13 April 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			yang juga merangkul NGO - NGO di Indonesia dalam memperjuangkan Palestina. Sekjen GCQP, menyampaikan apresiasinya atas simpati dan semangat yang diberikan oleh Indonesia, dan berharap agar Indonesia dan Palestina juga dapat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dan kerja sama di bidang pembangunan ekonomi.	
14.	BKSAP - KSB	Pertemuan dgn Dubes Kuwait	Wakil Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera (F-PKS) bersama Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Kuwait, M. Haerul Amri (F-P Nasdem) mengadiri jamuan Duta Besar Kuwait utk Indonesia, Abdulwahab Abdullah Al-Sager. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai upaya peningkatan hubungan bilateral kedua negara, termasuk peningkatan kerjasama antar parlemen kedua negara. DPR RI telah membentuk Grup Kerjasama Bilateral dengan Parlemen Kuwait yang diharapkan dapat menjadi focal point untuk berbagai kerjasama antar parlemen kedua negara.	
15.	BKSAP – KSI	Mengikuti The 3rd Global Young MP Initiative Meeting "Innovations to Eliminate Learning Poverty",	Anggota BKSAP DPR RI, Dyah Roro Esti (FP Golkar) menjadi moderator dalam pertemuan virtual *The 3rd Global Young MP Initiative Meeting "Innovations to Eliminate Learning Poverty*", yang diselenggarakan oleh *World Bank*. Turut hadir dalam pertemuan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Gilang Dhielafararez (FPDIP) bersama Anggota BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri (FPDIP).	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Pertemuan yang dihadiri kurang lebih 90 Young MPs/participants dari berbagai negara ini fokus membahas kemiskinan belajar, atau ketidakmampuan untuk membaca dan memahami teks sederhana pada anak usia 10 tahun. Menurut Bank Dunia, kemiskinan belajar pada usia sekolah dasar di Indonesia mencapai 35,4% pada tahun 2019. Artinya, kemiskinan belajar dialami oleh sekitar 3 dari 10 anak di Indonesia. Melalui pertemuan tersebut, Anggota BKSAP DPR RI Dyah Roro Esti menyampaikan di tengah pandemi covid-19 saat ini khususnya dari sektor pendidikan, bagaimana setiap negara untuk dapat hadir bekerjasama untuk melakukan sebuah intervensi. Sehingga nantinya di forum-forum internasional yang akan datang baik dari lintas negara maupun lintas parlemen dapat saling menguatkan dalam bentuk *transfer of knowledge* ataupun *transfer of technology* agar sistem pendidikan di negara yang saat ini sedang membutuhkan juga bisa berkembang. "Pada intinya bagaimana kita bisa bangkit dari pandemi, jangan sampai *the educational sector* atau sektor pendidikan ini malah mengalami penurunan. Maka kembali lagi bagaimana setiap negara bisa bekerja sama terkhusus di tengah-tengah pandemi Covid-19 dimana akses daripada pendidikan ini di beberapa negara sangat limited," ungkapnya.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)

NO	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri	Mahkamah Kehormatan Dewan telah melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dalam rangka Sosialisasi Tugas dan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Anggota DPR RI	
2.	Paket Meeting	Kegiatan Paket Meeting Mahkamah Kehormatan Dewan yang dilaksanakan di Wisma DPR RI Griya Sabha Kopo, Jawa Barat pada tanggal - Tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan bertema " Batasan Antara Perbuatan Pidana dan Etik" dengan mengundang Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H, M.H.sebagai Narasumber - Tanggal 7 – 9 April 2022 bertema "Optimalisasi Penegakan Kode Etik Anggota DPR dan Sistem Pendukung DPR" dengan mengundang Ketua Komisi Kejaksaan Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CfrA sebagai Narasumber - Tanggal 11 – 13 April 2022 beretema "Konstitusionalitas Putusan Peradilan Etik"dengan mengundang Peneliti dari Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D. sebagai Narasumber	

LAPORAN DWI MINGGUAN
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	Rapat BURT dengan Asuransi Jasindo Rabu, 30 Maret 2022 Agenda: Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama Bagi Anggota DPR beserta keluarganya.	1. Asuransi Jasindo akan menyampaikan laporan triwulan mengenai pelaksanaan *medical check up* (MCU) Anggota DPR RI, peserta yang telah menerima program jamkestama, dan kegiatan sosialisasi. 2. Asuransi Jasindo secara intensif akan melakukan sosialisasi mengenai perkembangan terakhir program jamkestama dan tutorial aplikasi program Jamkestama kepada setiap fraksi.	
2.	Rapat BURT dengan Sekretariat Jenderal DPR RI Rabu, 30 Maret 2022 Agenda: Nota Penjelasan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Usulan Anggaran.	Rancangan RKA DPR RI Tahun 2023 berdasarkan Usulan Anggaran sebesar Rp8.995.163.238.000,-	
3.	Rapat Panja BURT dengan Sekretariat Jenderal DPR RI Kamis, 31 Maret 2022 Agenda: Pendalaman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Usulan Anggaran Satker Dewan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Usulan Anggaran Satker Setjen.	1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2023 Satker Dewan berdasarkan Usulan Anggaran sebesar Rp 6.290.601.412.000,- 2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2023 Satker Setjen berdasarkan Usulan Anggaran sebesar Rp 2.704.561.826.000,-	

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
4.	Rapat BURT dengan Sekretariat Jenderal DPR RI Kamis, 31 Maret 2022 Agenda: Laporan Panja-Panja BURT	-----	
5.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Pengawasan pelayanan program Jamkestama yang dilaksanakan rumah sakit provider Asuransi Jasindo: 1. Tanggal, 1-3 April 2022, ke Bogor, Jawa Barat. 2. Tanggal 4-6 April 2022 ke Bandung, Jawa Barat. 3. Tanggal 7-9 April 2022 ke Tangerang, Banten. 4. Tanggal 10-13 April 2022 ke Makassar, Sulawesi Selatan	Peninjauan rumah sakit provider Asuransi Jasindo dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, hasil peninjauan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi BURT terhadap pelayanan program Jamkestama.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	• Pemda Provinsi Maluku Utara; • Kantor BPK Perwakilan Provinsi maluku Utara, dan; • Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara.	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara, *selanjutnya melakukan pertemuan dengan Kepala* Kantor BPK Perwakilan Provinsi maluku Utara, Gubernur Provinsi Maluku Utara dan *Kepala* Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait permasalahan Agraria/Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional.	Kunjungan Kerja dilaksanakan, tanggal 28 s.d 31 Maret 2022
2.	• Pemda Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur; • Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, • Kantor Wilayah Bea Cukai Malang, dan; • Para Pengusaha Rokok di wilayah Kota/Kabupaten Malang.	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, *selanjutnya melakukan pertemuan dengan Kepala* Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Bupati Kabupaten Malang dan *Kepala* Kantor Wilayah Bea Cukai Malang dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Bea Cukai.	Kunjungan Kerja dilaksanakan, tanggal 4 s.d 6 April 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	• Pemda Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah; • Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, • Kantor Wilayah Bea Cukai Kudus, dan; • Para Pengusaha Rokok di wilayah Kabupaten Kudus.	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, *selanjutnya melakukan pertemuan dengan Kepala* Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Bupati Kabupaten Kudus dan *Kepala* Kantor Wilayah Bea Cukai Kudus dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Bea Cukai.	Kunjungan Kerja dilaksanakan, tanggal 12 s.d 14 April 2022

LAPORAN DWI MINGGUAN
PANITIA KHUSUS (PANSUS)

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Pimpinan Pansus	Membahas kegiatan pembahasan RUU tentang Landas Kontinen	Pimpinan menyepakati untuk kegiatan pembahasan RUU Landas Kontinen Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022	Rapat tanggal 30 Maret 2022
2.	Rapat Kerja dengan : 1. Menteri Kelautan dan 1. Perikanan 2. Menteri Petahanan 3. Menteri Luar Negeri 4. 4. Menteri Hukum dan HAM	Pembahasan DIM RUU Landa Kontinen dan Pembentukan Tim Panja, Timus, Timsin.	Seluruh fraksi menyepakati untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Landas Kontinen	Rapat tanggal 14 April 2022

*****